

**SUATU ANALISIS HUBUNGAN BILATERAL RRC-VATIKAN
DALAM BIDANG SOSIAL KEAGAMAAN**



| | |
|------------------------|--|
| UNIVERSITAS HASANUDDIN | |
| No. 01-03-2007 | |
| Fak. Sospol | |
| 1 (satu) / 04 | |
| H | |
| 98/01-3-7. | |
| No. 1 | |

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Disusun Oleh

SURIPTO

E 131 02 067

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "SUATU ANALISIS HUBUNGAN BILATERAL RRC-VATIKAN DALAM BIDANG SOSIAL KEAGAMAAN"
Nama : SURIPTO
Nomor Pokok : E 131 02 067
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Makassar, 16 Februari 2007

Pembimbing I

Prof. Dr. J. Salusu, MA
NIP. 130 100 374

Pembimbing II

Drs. Aspiannor Masrie
NIP. 131 992 457

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. Armin Arsyad, MA
NIP. 131 961 985

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Judul Skripsi : *Suatu analisis Hubungan Bilateral RRC – Vatikan Dalam Bidang Sosial Keagamaan*

Nama : Suropto

NIM : E 131 02 067

Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jumat, 16 Februari 2007.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. Dr. J. Salusu, MA.

Sekretaris : Ishaq Rahman, S.IP

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie
2. Seniwati, S. Sos., M. Hum
3.. Agus Salim B, SIP., MIRAP



Handwritten signatures of the evaluation team members, each followed by a dotted line for a name or title.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kekehadirat Tuhan Allah yang Maha Baik dan penuh Anugerah yang tak terbatas atas rahmat, hidayah, nikmat kesehatan, kekuatan, keimanan dan ilmu yang berguna yang diberikan kepada kita semua.

Tulisan ini adalah buah tangan dari penulis yang disiapkan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Namun, penulis menyadari bahwa segala upaya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, diharapkan saran dan masukan demi menyempurnakan penulisan ini yang kiranya kelak dapat digunakan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Sumitro alm.** dan Ibunda **Sutih** yang sangat saya kasihi atas limpahan kasih sayang serta panjatan doa yang tak kenal usai, juga buat saudara-saudaraku tersayang, **Sudarti, Ngatwono** dan keluarga, **Sumiati, Kartawi** dan keluarga, **Suharni, Kiat** dan keluarga, **Sukarsih, Yulibert Endy, Agus. S.S., Ana**, dan keluarga, **Budi Susilo, Clara**, dan keluarga, **Suwondo, Afry**, dan juga saudara-saudaraku **Suparjo, Sutami, Sudarto alm.** Serta keluarga kerabat handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala dukungan yang besar dan berarti.

Rasa terima kasih yang besar dan penghargaan penulis haturkan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO.** beserta staf.
2. Bapak Dekan FISIP UNHAS, **Deddy T. Tikson, Ph.d.** beserta staf.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS, **Dr. Armin Arsad, MA.**, beserta segenap karyawan administratif yang banyak membantu penulis sejak terdaftar sebagai mahasiswa
4. Bapak Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **Drs. Aspiannor Masrie**, atas segala masukan dan dorongan kepada penulis
5. Konsultan I, **Prof. Dr. J. Salusu, MA.**, dan Konsultan II, **Drs. Aspiannor Masrie**, yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan masukan dan dorongan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Edukatif pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan sejak penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. J. Salusu, MA.**, **Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA.**, **Drs. Patrice Lumumba, MA.**, **Drs. H. Darwis, MA.**, **Drs. Muliadi Sukardi, M.Si (Alm)**, **Drs. Aspiannor Masrie**, **Drs. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.**, **Drs. Nasir Badu, S.IP., MA.**, **Seniwati S.Sos., M.Hum.**, **Dra. Oke Dilemma**, **Drs. Hussain Abdullah**, **Drs. Munjin Syafik Asy'ari**, **Ishak Rahman, S.IP.**, dan **Agus Salim B, S.IP., MIRAP.**
7. Teman-teman se-HI, spesial tuk ANGKATAN '02 yang lucu-lucu & aneh-aneh: **Elly, Syari, Alin, Riza, Nati, Nani, Hikmah, Yeni, Ema, Erni,**

Ayu, Hera, Nunung, Perla, Anti, Wati, Ririn, Irma L., Evi, April, Chica, Natha, Desi, Christy, Dinar, Vita, Ruri, Maya, Yuni, Marwah, Ma'wa, Sophie, Aulia, Normayana, Rifka, Nurahmah, Anifah, Nugrah, Septi, Irma P., Veni, Husna, Mute, Vera, en Mery, Acong, Adri, Aziz, Ahmadi, Amri, Dafri, Ruli, Endri, Arif, Helmi, Yudi, Adit, Reinhard, Opiq, Ano, Farid, Firman 01, Yacob, Imam dan lain-lain.....terimakasih atas hari-hari yang penuh tawa dan warna.

8. **Kakak-kakak senior dan Adik-adik yunior** di HI, bergaul dan berinteraksi dengan kalian semua membuat hari-hariku lebih berwarna.
9. Teman posko KKN Desa Punranga, Kec. Ma'Rang, Pangkep, Wahyuni, Sukma, Ampi, Zakharia, teman-teman satu kecamatan Ma'Rang.kapan kita ketemu en kumpul2 lagi. Ibu dan Bapak Desa, Puang Ati, Puang Amang, Puang Endang alm., Puang Nuhung dan keluarga, Puang Idris dan keluarga, Ilham, Puang Saude, Bapak dan Ibu Geby, Ida dan keluarga, Wawan dan teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segalanya terutama selama kami KKN.
10. **Ibu Ija, Ibu Lia dan Ibu Kasma, serta Ibu Damaris**, terima kasih atas bantuannya.
11. Teman-teman **PMKO, K Nanet, Yenny, Apri, Ipah Besar, Wanus Alam, K Jo, Richard**. Dan senior-senior **PMKO** lainnya. **Angkatan 02: Agnes, Ipah, Rein, Christy** untuk kebaikan hatinya, dan **Angk. 03, angkatan 04, Angkatan 05. Angkatan 06** dan teman-teman lainnya. **Bato dan Etu.**

12. Juga buat mas **Nino, Zul, Chandar, Heni, Jony, Paulina**, teman-teman pondokan Cahaya, Titanic dan lain-lain.
13. Buat **Ahsani Amalia (Amel), Imran, Vera Cakti Randa** dan alin-lain. thanx buat dukungannya.
14. Buat **Papa Budi, Mama Ita, K Pram, Bondeng (christy)** makasih buat doa dan supportnya. GBU.
15. Teristemewa dan paling mendalam di hati, yang dengan kesabaran dan pengertiannya, **Stella (my Little Angel) kekasih hatiku, papa Lexi, mama Ann, Steve, Maya dan keluarga, Stanley dan Ayi, Steni dan Fin**, Love u all.
16. Teman-teman dan pihak lainnya yang tak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, makasih telah banyak memberi arti. *We had a story each other...*

Harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Sekian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. GBU and all yours always.

Makassar, 16 Februari 2007

Penulis

ABSTRAKSI

Suripto, E 131 02 067, Judul Skripsi : Suatu Analisis Hubungan Bilateral China-Vatikan Dalam Bidang Sosial Keagamaan, di bawah bimbingan Bapak J. Salusu, selaku pembimbing I, dan Bapak Aspiannor Masrie selaku pembimbing II, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hubungan bilateral yang terjalin antara Republik Rakyat China dengan Vatikan dalam bidang sosial keagamaan, dimana China sebagai negara komunis, yang tentu saja atheis, memiliki warga negara yang beragama khususnya Katolik dan Gereja Katolik itu sendiri memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Vatikan (Gereja Universal) dan bagaimana reaksi dan tindakan pemerintah China mengenai hubungan Vatikan dengan Gereja di China menyangkut kepentingan dalam negeri China.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian eksplanatif. Penulis menjelaskan fakta-fakta yang ada mengenai hubungan bilateral China-Vatikan dalam substansi sosial keagamaan yang merupakan fokus Vatikan, yaitu dalam bidang kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu, data sekunder yaitu data hasil olahan dari berbagai instansi. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka atau *library research*, yaitu penulis melakukan penelitian pada beberapa perpustakaan dengan maksud mencari informasi dari berbagai literatur, buku, majalah, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: hubungan bilateral China-Vatikan yang secara resminya tidak memiliki hubungan diplomatik, namun memiliki hubungan yang terjalin dalam kontak yang terus menerus meskipun seringkali kontakanya bersifat negatif. Vatikan memiliki hubungan yang erat dengan Gereja Katolik di China meskipun memiliki "ketegangan" dengan pemerintah China, karena Gereja China merupakan satu kesatuan dengan Gereja Dunia yaitu Vatikan itu sendiri. Pemerintah China menginginkan agar Vatikan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan karena Vatikan merupakan satu-satunya negara Eropa yang masih mempertahankan kedaulatannya terhadap Taiwan.

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| HALAMAN PENGESAHAN | i | |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI | ii | |
| KATA PENGANTAR | iii | |
| ABSTRAK | vii | |
| DAFTAR ISI | viii | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Batasan dan Rumusan Masalah | 4 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| | D. Kerangka Konseptual | 6 |
| | E. Defenisi Operasional | 8 |
| | F. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II | TELAAH PUSTAKA | |
| | A. Hubungan Internasional dan Kerjasama Bilateral | 12 |
| | B. Kepentingan Nasional | 20 |
| | C. Konsep Sosial Keagamaan | 22 |
| BAB III | GAMBARAN UMUM HUBUNGAN RRC-VATIKAN | |
| | A. Fluktuasi Hubungan Bilateral Cina-Vatikan | 33 |
| | B. Kondisi Sosial Keagamaan RRC | 38 |
| | C. Kondisi Sosial Keagamaan Vatikan | 43 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Substansi Hubungan Sosial Keagamaan Vatikan-Cina | 51 |

| | | |
|-----------------------|--|----|
| | B. Upaya Peningkatan Kerjasama Hubungan Cina-Vatikan | 63 |
| | C. Prospek Hubungan Bilateral Cina-Vatikan | 67 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Simpulan | 74 |
| | B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 77 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan yang dihadapi setiap negara, negara tersebut pasti membutuhkan bantuan dari negara lain, hal tersebut tidak dapat dipungkiri, bahkan oleh negara terkuat sekalipun. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh setiap negara itulah menyebabkan dibutuhkannya kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini telah berkembang berbagai bentuk kerjasama antarnegara, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Dari aneka ragam bentuk kerjasama tersebut, kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dominan, dalam artian paling banyak dan sering dilakukan oleh semua negara. Berdasarkan sejarah, perkembangan kerjasama antar negara-negara telah berlangsung lama, sudah terjalin hubungan internasional yang dilakukan oleh aktor-aktor non-state baik dengan negara/kerajaan, maupun dengan sesama aktor non-state.

Seiring dengan perkembangan global, banyak negara-negara yang kemudian memfokuskan kerjasama atau hubungan bilateralnya dalam satu aspek atau bidang tertentu yang menjadi focus kepentingannya. Kerjasama inipun sudah tidak lagi terbatas hanya pada satu kawasan yang sama, bahkan sudah berkembang menjadi bentuk kerjasama antar Negara atau antar aktor hubungan internasional yang terletak pada kawasan yang berlainan. Dan juga melibatkan kelompok-kelompok Negara,

perusahaan multinasional, yang tentu saja bertemu dalam satu kerangka yang sama, yaitu mencapai kepentingannya. Bentuk interaksi antar bangsa atau Negara pada umumnya di kenal ke dalam dua bagian, yaitu kerjasama dan konflik. Interaksi dalam bentuk konflik biasanya akan mengarah kepada *zero sum game*, dimana ada actor yang menang mutlak dan ada actor yang kalah total, sedangkan bentuk interaksi kerjasama lebih berorientasi kepada pencapaian manfaat yang maksimal oleh masing-masing aktor yang terlibat, atau *win-win solution*, walaupun jumlah atau kualitasnya kadang-kadang tidak sama. Dalam hubungan internasional kontemporer bentuk interaksi kerjasama lebih diprioritaskan oleh setiap actor. Hal ini didorong oleh mulai bergesernya agenda utama yang lebih menekankan bidang tertentu yang lebih spesifik, berbeda dengan pola interaksi dimasa lalu yang diwarnai oleh konflik untuk mencapai suatu tujuannya.

Seiring perkembangan jaman dan perubahan konstelasi politik dan sosial global yang sangat pesat, semakin banyak pula negara-negara yang mulai menunjukkan identitas dirinya melalui pengaruh-pengaruh yang dilakukannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Cina telah menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam dunia internasional. Dengan penduduk yang teeramat besar, dan juga peningkatan kemampuan ekonomi dan militer yang pesat, Cina menjelma menjadi negara yang besar. Meskipun begitu, sama halnya seperti halnya Negara-negara di dunia ini, Cinapun memiliki masalah dalam negeri yang cukup rumit, terutama

menyangkut Taiwan dan hak asasi manusia. Dalam hal ini pula Cina mempunyai Hubungan bilateral yang unik dengan Vatikan.

Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia sehingga bisa di sebut negara dalam Negara. Vatikan atau Tahta Suci merupakan sebuah negara unik, contoh dari sebuah kerajaan di mana fungsi kepala negara, yaitu sang Paus, tidak diwariskan tetapi dipilih untuk seumur hidup oleh dewan Kardinal. Paus itu sendiri bisa berasal dari Negara manapun selama ia merupakan anggota Katolik Roma. Istilah Tahta Suci itu sendiri merujuk kepada otoritas, yuridiksi dan kedaulatan Paus dan para penasihatnya dalam memimpin gereja Katolik Roma dan memiliki hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat.¹ Vatikan menerima duta besar dari negara-negara lain dan juga mengirimkan duta besarnya untuk negara-negara lain.

Hubungan antara Vatikan dan Cina tidak diketahui secara jelas kapan bermulanya, namun diperkirakan sekitar abad 13-15 sudah terjalin hubungan yang berkelanjutan antara Cina dan Vatikan. Meskipun ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa keKristenan sudah masuk ke Cina sekitar tahun 635 Masehi dengan ditemukannya tugu batu di Xi'an.² Dan semenjak itu pula keKristenan mulai berkembang di Cina, meskipun sering terjadi tindakan represif dari penguasa yang ada, dari masa dinasti Ming hingga saat ini keadaan tersebut masih saja terjadi. Saat inipun pemerintah Cina tetap melakukan tekanan dan pengaruhnya terhadap gereja-gereja di Cina. Dan konflik yang terbaru adalah pengangkatan Uskup (pimpinan

¹ *Vatikan and China*, <http://www.wikipedia.org/vatikanchina.htm>, diakses 7 Oktober 2006

² *ibid*

gereja Katolik di negaranya masing-masing dan sebagai perpanjangan tangan dari Paus) secara sepihak oleh pemerintah Cina yang seharusnya merupakan kewenangan Vatikan. Hal ini sangat ditentang oleh Vatikan. Semenjak peristiwa itu kedua belah pihak semakin meningkatkan intensitasnya dalam menjalin komunikasi. Vatikan sebagai Negara kaukus istimewa, mempunyai pengaruh yang cukup luas dalam dunia internasional, meskipun tidak memiliki kekuatan secara langsung untuk memberikan *pressure*, namun Vatikan memiliki perwakilan di banyak Negara dan bahkan di tiap Negara bagian atau propinsi. Cina pun memandang Vatikan sebagai kerjasama yang perlu, terutama menyangkut permasalahan Taiwan, di mana Vatikan adalah satu dari Negara berdaulat yang mempertahankan pengakuan diplomatik atas RRC di Taiwan. Dari uraian di atas, maka dianggap perlu untuk membahas hubungan bilateral Vatikan-Cina.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Hubungan bilateral Vatikan Cina telah berlangsung sejak lama semenjak Cina masih berupa Dinasti-dinasti. Seiring waktu, perkembangan hubungan bilateral keduanya pun semakin meningkat, meskipun sering pula terjadi konflik diantaranya. Namun kedua belah pihak, terutama Vatikan tetap berupaya membangun komunikasi yang positif menyangkut hubungan bilateral keduanya. Pada tulisan ini penulis berupaya membatasi tulisan pada hubungan bilateral kedua Negara dalam bidang sosial keagamaan yang juga mencakup politik.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa substansi hubungan sosial keagamaan Vatikan-Cina dan politik internasional kedua negara?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Cina dan Vatikan dalam meningkatkan hubungan bilateral Vatikan-Cina?
3. Bagaimana prospek hubungan bilateral Vatikan-Cina?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai :

- a) Substansi hubungan bilateral Vatikan-Cina di bidang sosial keagamaan
- b) Upaya peningkatan kajian hubungan bilateral Vatikan-Cina
- c) Prospek hubungan bilateral Vatikan-Cina

2) Kegunaan Penelitian

- a) Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembang studi Ilmu Hubungan Internasional dan siapa saja yang memberikan perhatiannya pada Hubungan Internasional di masa yang akan datang.
- b) Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang mempunyai minat terhadap Hubungan Bilateral RRC-Vatikan secara khusus.

D. Kerangka Konseptual

Perkembangan jaman yang semakin pesat dan kompleks membuat setiap negara dan aktor-aktor non-state meningkatkan intensitasnya dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten dengan kepentingannya masing-masing. Bagi negara-negara, tujuan kepentingan nasional menjadi dasar utama dalam menjalin hubungan kerjasama dengan actor internasional lainnya. Dimana terdapat kekurangan di dalam negeri, baik itu bisa berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Adanya kebutuhan yang semakin kompleks diperhadapkan dengan potensi-potensi dalam negeri yang kurang memadai, oleh karena itu setiap Negara berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan setiap Negara khususnya untuk memenuhi kepentingan dalam negerinya. Kerjasama dalam berbagai aspek, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya yang sesuai dengan kepentingannya. Dalam pengantar Hubungan Internasional, Budiono mengatakan bahwa :

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, budaya, dan struktur ekonomi.³

Sementara dalam kamus politik internasional hubungan bilateral berarti “keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi timbale balik antara dua pihak (dua negara)” hal ini bermakna bahwa

³ Budiono Kusumohattidjojo, 1992, *Pengantar Hubungan Internasional*, Armico, Bandung, hal.48.

hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya.

Setiap interaksi yang dilakukan antar negara dalam berbagai bidang merupakan upaya dari pemerintahan masing-masing untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Seabury mengatakan bahwa :

Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita tujuan suatu negarayang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, gejala tersebut merupakan suatu normative, atau konsep umum kepentingan nasional....arti kedua yang sama pentingnya biasa bersifat deskriptif, dimana kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara melalui pemerintah negara.⁴

Seiring dengan semakin kompleksnya kerjasama internasional yang dijalin antara Negara-negara yang satu dengan yang lainnya yang kemudian bisa saja menimbulkan konflik dikarenakan adanya pengaruh yang diberikan kedua negara dalam upaya untuk mencapai kepentingannya masing-masing, antara lain dengan digunakannya kekuatan politik, seperti yang dikatakan Dahlan Nasution :

...kekuatan politik adalah hubungan psikologis di antara kekuatan yang menggunakannya dan terhadap siapa hal ini digunakan. Kekuatan politik itu memberi yang pertama Kesempatan mengontrol tindakan-tindakan dari yang kedua melalui pengaruh yang dijalankan oleh yang pertama tersebut.⁵

Penggunaan pengaruh oleh satu pihak terhadap pihak lain lebih dominan menuju kearah penguasaan , baik secara total maupun sedikit bagian. Seringkali hal tersebut menimbulkan suatu perbenturan pemahaman dan kepentingan sehingga rawan

4. M. P. To, 1998, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, Grafindo, Jakarta hal.

5. Dahlan, 1984, *Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional: Kekuatan dan Kebijakan Karya*, Bandung hal. 24.

menuju ke arah kontroversi yang kemudian bisa saja menimbulkan konflik, meski tidak selamanya hal tersebut membawa dampak negative. Karena kontroversi bisa saja menimbulkan rangsangan positif sama halnya seperti kemungkinan hal negative yang dapat terjadi.

E. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk mencari pengertian dan pengetahuan yang mendalam terhadap suatu hal, baik itu yang bersifat benda ataupun peristiwa diperlukan upaya yang focus dan penuh perhatian pada hal tersebut, itulah analisis yang tentu saja membutuhkan kajian yang mendalam dan banyak *input*. Terutama dalam hubungan internasional, khususnya pada hubungan bilateral yaitu suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk mencapai kepentingan nasional dan juga berupaya menciptakan perdamaian dengan kerjasama dalam bidang politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Dalam tulisan ini penulis ingin menganalisa hubungan bilateral antara Cina yang merupakan Negara Asia berfaham komunis yang terbesar di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet menjadi pecahan Negara-negara kecil Eropa Timur. Cina telah tumbuh dengan semakin pesat menjadi Negara yang besar. Dengan posisinya sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB, berarti memposisikan Cina sebagai Negara yang memiliki pengaruh yang besar dalam dunia internasional. Cina memiliki corak kehidupan sosial dan keagamaan masyarakatnya yang unik dan

kuat dalam hal masalah tradisi. Meskipun masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Negara tersebut.

Vatikan sebagai sebuah negara unik, contoh dari sebuah kerajaan yang mempunyai kedaulatan, meskipun terletak di dalam bagian negara lain, atau bisa juga disebut Negara Kota. Nama lain dari Vatikan adalah Holy City atau Tahta Suci berkaitan dengan otoritas, yuridiksi dan kedaulatan Paus dan para penasihatnya dalam memimpin gereja Katolik Roma dan memiliki hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Dalam tulisan ini hubungan bilateral keduanya akan di bahas dalam bidang sosial, yaitu kehidupan, relasi yang terjalin antara individu dengan individu, dengan masyarakat dan negara. Dan bidang keagamaan, yaitu kepercayaan dan keyakinan individu dan faham negaranya, yang mencakup pula bidang politik sebagai kajian dasar hubungan antar Negara.

F. Metoda Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan substansi hubungan sosial keagamaan RRC-Vatikan, apa saja yang menjadi hambatan dalam hubungan bilateral keduanya dan bagaimana upaya yang dilakukan kedua negara, khususnya Vatikan untuk meningkatkan kerjasama dengan Cina.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah tehnik telaah pustaka (*Library Research*) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan hubungan bilateral Vatikan-Cina dalam bidang sosial keagamaan dan politik luar negerinya. Literature yang digunakan berupa, buku, jurnal, surat kabar, majalah, artikel-artikel lainnya. Data-data tersebut dapat diperoleh dari beberapa tempat seperti perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait seperti :

- 1) Perpustakaan Katedral
- 2) Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan
- 3) Perpustakaan Universitas Hasanuddin
- 4) Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- 5) Website Departemen Luar Negeri
- 6) Website Vatikan
- 7) Website Cina
- 8) Website Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai hubungan bilateral antara Vatikan dan Cina dalam bidang sosial keagamaan dan juga dalam bidang politik.

4. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Dimana data sekunder (pustaka) ini digunakan sebagai data utama dari permasalahan yang di bahas. Data yang bersifat kuantitatif digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

5. Metoda Penulisan

Metoda penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif, yaitu penulis memaparkan substansi hubungan bilateral sosial keagamaan Vatikan-Cina. Kemudian dibuat kesimpulan khusus mengenai substansi hubungan bilateral kedua negara tersebut dan upaya peningkatan hubungan bilateral yang dilakukan kedua negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Internasional dan Kerjasama Bilateral

Ilmu hubungan internasional pada awal perkembangannya lebih difokuskan pada hubungan antar negara saja oleh sebagian akademisi, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu, ilmu hubungan internasional-pun semakin diakui mempunyai banyak aspek yang perlu di kaji. Ilmu hubungan internasional itu dapat dikatakan ilmu yang mempelajari masyarakat internasional dengan negara sebagai anggota masyarakat internasional itu sendiri. Ilmu hubungan internasional dalam arti yang lebih luas tidak hanya melingkupi unsur politik saja, melainkan melingkupi juga unsur-unsur ekonomi, sosial-budaya, dan lain-lain. Seperti: pertukaran budaya, perpindahan penduduk, pariwisata dan olahraga (olimpiade)⁶ Namun, pada umumnya banyak yang memandang ilmu hubungan internasional dengan menekankan pada aspek politik dan hubungan antara negara-negara yang dapat ditelaah melalui politik luar negeri; negara yang bersangkutan. Karena jika dipandang sebagai subjek akademis, ilmu hubungan internasional terutama lebih memperhatikan hubungan politik antar negara.

Hubungan internasional adalah suatu bentuk interaksi antara aktor atau masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang lain, yang terdapat di negara-negara yang berdaulat di dunia, dan juga dengan aktor bukan

⁶ Aris, *Hubungan Internasional 2005: Pengantar Hubungan Internasional*, Yayasan Mochamad Yand. Rosita

negara yang tindakannya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan antar negara dan bangsa. Hubungan ini mengacu pada banyak aspek hubungan internasional berfungsi untuk mempelajari perilaku internasional, baik itu para aktor yang negara ataupun bukan negara di dalam kancah internasional. Semuanya itu dapat terwujud dalam bentuk konflik, perang, kerjasama, dan interaksi dalam organisasi-organisasi pemerintah dan MNC (*Multi National Corporation*).

Hubungan internasional berhubungan dengan segala bentuk interaksi masyarakat negara-negara, baik itu oleh negara (pemerintahannya) maupun oleh warga negaranya, yang mencakup segala macam hubungan di antara berbagai negara yang ada di dunia ini. Hubungan internasional merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh negara dan tidak bisa tidak untuk dilakukan karena adanya ketergantungan, saling membutuhkan antara satu aktor dengan aktor lainnya. Dan juga akibat bertambah kompleksnya kehidupan umat manusia dalam masyarakat internasional seiring globalisasi yang melanda bumi ini sehingga tidak memungkinkan bagi suatu negara untuk menutup diri terhadap dunia luar tidak melalaikan kontak dengan pihak lain. Seiring globalisasi itu pula peranan aktor-aktor bukan negara semakin meningkat, batas-batas antara negara semakin tidak penting, tidak relevan karena dengan kemajuan teknologi dan informasi, batas-batas wilayah geografis menjadi tidak dianggap penting lagi.

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang beberapa aktor hubungan internasional yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah,

kesatuan sub-nasional yang meliputi birokrasi, pemerintah domestic, serta individu-individu.⁷

Dalam hubungan internasional negara bangsa dapat dikatakan sebagai pelaku utama dari hubungan internasional, karena yang melakukan suatu tindakan dan yang terkena dampak dari tindakan itu adalah unit politik, walaupun tidak menutup kemungkinan yang melakukan suatu tindakan itu adalah aktor bukan negara. Toma dan Gornah menyatakan bahwa

faktor pendukung utama untuk kesinambungan (kontinuitas) hubungan internasional adalah faktor negara bangsa (nation state), yang dengan atribut kedaulatan dan penggunaan power untuk kepentingan nasional, berupaya untuk mempertahankan kuasa utamanya dalam hubungan internasional.⁸

Beberapa pengaruh-pengaruh yang tidak dapat dielakkan timbul dalam lingkungan internasional, kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan pada setiap bidang bertukar dengan sikap jangka waktu tertentu, di mana kebiasaan-kebiasaan internasional dan peraturan permainan yang mengatur pergaulan internasional tidaklah statis. "Dengan demikian alat dan teknik yang cocok dan sesuai untuk hubungan antar pemerintah atau antar bangsa telah semakin diperlengkapi dan sampai pada satu periode tertentu diganti dengan pendekatan yang sesuai".⁹

Dalam studi hubungan internasional itu sendiri terdapat beberapa acuan yang sudah digunakan dalam menelaah hubungan antar bangsa. Beberapa konsep umum dalam Hubungan Internasional:

⁷ Anak Agung Banyu Perwita, 2005, *Pengantar Hubungan Internasional*, Yayasan Mochamad Yand. Rosdakarya: Bandung hal. 4

⁸ Ibid, hal. 8

⁹ Frankel, J., 1991, *Hubungan Internasional*, terjemahan : Laila H. Hasyim, Bumi Aksara: Jakarta, hal. 119



- Peranan

Peranan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu, tergantung kepada posisi dan kedudukan struktur tersebut yang juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi juga kemampuan dari si pemeran. Peranan juga berarti tugas utama yang harus dilaksanakan. Mochtar Mas' oed mendefenisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi yang terfokus pada perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan orang tersebut berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.¹⁰ Teori peranan menengaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipengang oleh aktor politik.¹¹

- Pengaruh

Konsep pengaruh didefenisikan sebagai kemampuan perilaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut¹². Pengaruh adalah salah satu aspek kekuasaan yang merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Interaksi saling mempengaruhi dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia, sehingga bisa dikatakan bahwa

10. Mochtar Mas' oed, 1974, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Lp3ES: Jakarta.
11. Mochtar Mas' oed, 2005, *Pengantar Hubungan Internasional*, Yayasan Mochamad Yand.
12. Mochtar Mas' oed, 1974, 30

dinamika hubungan internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek tertentu dan aspek-aspek lainnya.

- Kerjasama

Kerjasama internasional adalah sisi yang berlawanan dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Kerjasama internasional merupakan titik temu dari aneka ragam kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai aspek seperti: politik, ekonomi, sosial-budaya, ideologi, hankam, dll, hal tersebut menimbulkan aneka ragam kepentingan yang mengakibatkan berbagai masalah sosial, maka dicapai suatu kerjasama internasional yang dilakukan oleh hubungan negara dalam upaya mencari solusi masalahnya itu.

- Analisis Sistem

Varma dalam bukunya Teori Politik Modern menyatakan:

Analisis sistem dalam studi hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat di bagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain¹³.

Hubungan internasional dewasa ini telah meningkat dengan pesat dibandingkan hubungan yang lalu. Semuanya itu seiring dengan perkembangan

¹³ S. P. Varma, *Modern*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 317

global yang semakin cepat dan merambah seluruh wilayah negara-negara. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi yang teramat pesat. Globalisasi yang melanda dunia ini memberikan banyak efek baik itu yang positif maupun negative. Salah satu efek adalah meningkatnya hubungan internasional. Hubungan internasional mencakup berbagai aspek yang ada dalam negara seperti: ekonomi, sosial-budaya, keamanan, olahraga, dll. Semuanya tergantung dari aktor-aktor/negara-negara yang melakukan hubungan internasional. Negara-negara ini dalam kerangka hubungan internasional berupaya untuk mencapai kepentingan atau memenuhi tujuannya. Dan hal tersebut bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya (*national interest*). Suatu negara yang memiliki keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya dalam bidang apapun itu, akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, antara lain dengan menjalin hubungan/kerjasama dengan negara lain.

Kerjasama, dimana masalahnya tidak hanya terletak pada identifikasi seseorang ataupun bersama dan metode untuk mencapainya tetapi lebih terfokus pada pencapaian sasaran itu. Dalam jalinan kerjasama, terutama kerjasama bilateral, sasaran yang ingin dicapai oleh negara yang satu belum tentu sama atau sepadan dengan tujuan dari negara yang lainnya, tergantung dari kepentingan masing-masing negara. Bentuk-bentuk kerjasama itu sendiri dapat dilihat dari beberapa sisi kerjasama itu sendiri. Jika dilihat berdasarkan wilayah maka kerjasama dapat berbentuk kerjasama regional dan antar wilayah regional. Jika berdasarkan aktor

atau pelakunya maka terbagi atas kerjasama unilateral, bilateral dan multilateral. Dan kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang sering dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Hubungan bilateral dalam kamus politik internasional adalah "keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)"¹⁴. Ini bermakna bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan yang dijadikan oleh dua negara yang saling timbal balik atau mempengaruhi dalam upaya mencapai tujuan masing-masing. Hubungan bilateral dapat didorong oleh beberapa sebab, antara lain: sumber daya alam, kependudukan, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan faktor lainnya, tergantung kepentingan nasional masing-masing negara. Budiono Kusumohadidjojo mengatakan bahwa: "Hubungan bilateral adalah suatu jalinan kerjasama yang terjalin antara satu pihak dengan pihak lainnya, atau antara satu negara dengan negara lain yang tujuan umum mencapai kepentingan nasionalnya"¹⁵.

Walaupun dalam hubungan bilateral yang seharusnya saling mempengaruhi pada kenyataannya akan saja terjadi ketimpangan pengaruh. Pengaruh yang diberikan oleh satu negara akan besar dibandingkan pengaruh dari negara yang kedua terhadap negara yang pertama. Bertolak belakang dari kekuatan politik mana yang paling besar, untuk mempengaruhi pihak lainnya. Kekuatan politik masing-masing dibedakan dari *force* yang berarti penggunaan *physical violence*¹⁶ bisa

¹⁴ Larosa Didi, 1990, *Kamus Politik Internasional*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 18

¹⁵ Budiono Kusumohadidjojo, 1990, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta, hal. 48

¹⁶ Donald Suroso, 1994, *Perang dan Lunak Dalam Hukum Politik Internasional*, Kekuatan Politik, Esensial Komadja Karya, hal. 24

menyebutnya *power*, untuk membedakannya dari defenisi *force*, Dahlan Nasution mengartikan *power* sebagai " ... hubungan psikologis diantara kekuatan yang menggunakannya dan terhadap siapa hal itu..."¹⁷. Kecenderungan untuk berkuasa adalah kodrat setiap manusia sejak dari tingkat keluarga hingga tingkat negara, karena hasrat akan *power* adalah elemen yang khas dari politik internasional, maka politik internasional tidak boleh tidak adalah *power politics*¹⁸. Meskipun kadangkala semuanya itu tersembunyi, tidak dapat diamati secara langsung.

Hubungan bilateral antara Cina dan Vatikan merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara dua negara yang kontradiktif. Di satu sisi, Vatikan adalah sebuah contoh dari negara agama yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu sedangkan Cina adalah sebuah negara yang berfaham komunis. Vatikan adalah negara terkecil di dunia dengan penduduknya yang sangat sedikit, sekitar 900.000 jiwa¹⁹ dan Cina adalah termasuk negara yang terpadat di dunia dengan penduduknya yang mencapai 1 Milyar jiwa lebih. Vatikan ataupun Tahta Suci²⁰ memiliki pengaruh yang kuat dan luas mencakup kewenangan gereja katolik dan jemaatnya. Dalam hal ini khususnya di negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Vatikan dan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut adalah negara yang mayoritas Kristen. Berkat pengaruh spiritual terhadap orang-orang yang percaya dan setia, Vatikan mempunyai pengaruh politik terhadap negara-

¹⁷ Dahlan Nasution, *Op.cit* hal. 26

¹⁸ *Ibid*, hal. 26

¹⁹ <http://www.wikipedia.com/>

²⁰ Istilah Tahta Suci itu sendiri mengacu kepada lembaga yang mengatur Gereja Katolik, hal. 26

diakses 7 Oktober 2006

yang dimiliki oleh Vatikan dalam

[china.htm](#). diakses 7 oktober 2006

negara di mana agama katolik adalah mayoritas maupun minoritas yang kuat. Dalam hubungan bilateralnya dengan Cina yang berfaham komunis, seringkali terjadi kesulitan-kesulitan yang dialami agama katolik²¹. Hal ini dikarenakan kecurigaan yang besar terhadap agama katolik yang memiliki peranan yang besar dalam upaya penegakan HAM dan kebebasan beragama.

B. Kepentingan Nasional

Kini diketahui bahwa dalam hubungan bilateral antar negara yang diperhitungkan bukan hanya kedekatan geografis saja, bahkan antara negara yang berjauhan sekalipun bisa melakukan hubungan bilateral, karena adanya kepentingan-kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh masing-masing negara. Karena tujuan dari interaksi antar negara itu sendiri adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Siabury dalam hal ini menyatakan bahwa:

Itulah kepentingan nasional menunjukkan kepada aspirasi negara, sebagai tujuan yang umum dan berkesinambungan untuk mana negara ini bertindak, yang diaplikasikan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang actual dan rencana-rencana yang dituju.²²

Selain itu juga karena adanya sasaran-sasaran tertentu dari negara-negara tersebut untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, kebudayaan, dan lain-lain yang dapat menciptakan situasi yang lebih baik.

Konsep kepentingan nasional merupakan acuan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku internasional. Kepentingan nasional suatu negara merupakan

²¹ Soel, 1991, *Hubungan Internasional*, Bumi Aksara Jakarta, hal. 28

²² Soel, 1998, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Politik*, Grafindo: Jakarta, hal. 204

unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dalam faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kesejahteraan luar negerinya.²³ Keputusan yang diambil mengenai kebijaksanaan luar negeri berbeda dari keputusan yang diambil di bidang lain dalam hal kepentingan nasional adalah konsep inti dalam politik luar negeri.²⁴

Kepentingan nasional dapat melukiskan apa yang menjadi tujuan suatu negara. Kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional dalam aplikasinya pada kebijakan-kebijakan yang actual dan rencana-rencana yang dituju. Bahwa keputusan tentang kebijaksanaan luar negeri itu adalah subjek dari sang mempengaruhi antar lingkungan dalam negeri dan lingkungan luar negeri.²⁵ Dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, maka sang pembuat keputusan yang resmi sangatlah penting peranannya. Dan pemerintah secara keseluruhan dengan sepenuhnya memonopoli pengawasan kebijaksanaan luar negeri. Selain itu, pengaruh apapun atas kebijaksanaan luar negeri yang berasal dari sumber lain harus dilaksanakan melalui pemerintah.

Hubungan antar negara-negara diatur oleh sifat dari negara-negara itu sendiri maupun oleh masyarakat internasional. Dimana, sifat utama dari negara-negara adalah bahwa mereka itu berada di atas yang tertinggi dari organisasi manusia, dan negara-

²³ Anak Agung Banyu Perwita, 2005. *Hubungan Internasional*. Rosdakarya: Bandung, hal. 35

²⁴ Ibid, hal. 45

²⁵ J. Frankel, op. cit, hal. 33

Hubungan Internasional. Yavasari Mochamad Yand.

negara itu tidak mengakui sesuatu yang lebih tinggi dari padanya dan mereka diperintahi oleh kepentingan untuk diri sendiri. Sesuai dengan hal tersebut, masyarakat internasional tidak melancarkan kekuasaan otoritatif terhadap mereka, walaupun masyarakat itu merupakan peraturan-peraturan tingkah laku tertentu.²⁶

Para pembuat kebijaksanaan luar negeri memperhitungkan beberapa faktor yang menentukan tindakan kebijaksanaan luar negeri dalam hubungan internasional sebagai berikut:

- I. keadaan atau lingkungan internasional secara umum, termasuk sikap tindakan dan pertimbangan kepentingan nasional aparat pemerintah negara lain;
- II. kemampuan atau *power* yang dimiliki negara yang diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan;
- III. tindakan serta reaksi balik yang dilakukan negara lain yang terkait dengan kesempatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.²⁷

C. Konsep Sosial Keagamaan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, keberntanya selalu membutuhkan, - harus - berinteraksi dengan orang lain. Sementara agama adalah suatu sistem keyakinan dan pemujaan tertentu yang didasarkan kepada kepercayaan terhadap suatu hal, dengan kata lain, kepercayaan dan penyembahan kepada

²⁶ *Hubungan Internasional*, Bumi Aksara: Jakarta, hal. 90
²⁷ *Parwita, 2005, Pengantar Hubungan Internasional*, Yayasan Mochamad Yand, hal. 35

Tuhan atau dewa-dewi.²⁸ Agama yang menyangkut kepercayaan serta berbagai praktiknya dalam masyarakat yang mapan merupakan salah satu struktur fungsional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Agama juga telah dikritik sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim; sebagai sejumlah dasar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab.

Emile Durkheim seorang pelopor sosiologi agama di Prancis mengatakan bahwa agama merupakan sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi, sedangkan Marx mengatakan bahwa agama adalah candu bagi manusia.²⁹ Namun, yang jelas agama menunjukkan seperangkat aktifitas manusia dan sejumlah bentuk-bentuk sosial yang mempunyai arti penting. Jika membandingkan antara aktifitas keagamaan dengan aktifitas lain atau perbandingan lembaga keagamaan dengan lembaga sosial lain, menunjukkan bahwa agama, dalam pautannya dengan masalah yang tidak dapat diraba itu merupakan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sepele dibandingkan bagi masalah pokok manusia. Namun, kenyataannya menunjukkan hal yang lain. Sebenarnya lembaga keagamaan adalah menyangkut hal yang mengandung arti penting tertentu, menyangkut masalah aspek kehidupan manusia, yang dalam transedendennya, mencakup sesuatu yang mempunyai arti penting dan menonjol bagi

²⁸ Martin H. Murray, Fergus Mc Gauran, 1995, *Oxford Learners Pocket Dictionary, New Edition*, Oxford University Press, Printed in Hongkong, hal. 349

²⁹ Thomas F. O'Donnell, 1963, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Yayasan Solidaritas Gadjah Mada (YASOGAM), Cetakan ke-2, hal. 3

manusia. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan.

Perhatian bagi pengalaman semua keagamaan dan gerakan serta lembaga yang berasal darinya memberikan bahan yang sangat berarti bagi sosiologi agama. Fenomena ini mempengaruhi posisi agama dalam masyarakat, mengambil alih beberapa fungsinya, dan kadang-kadang terlibat dalam pertikaian yang serius dengan agama dan lembaga keagamaan. Dari tanggapan manusia terhadap pengalaman keagamaan itu terbentuk dan berkembanglah kehidupan dan lembaga keagamaan, ide-ide keagamaan dilengkapi dan praktek-praktek keagamaan dibukukan.³⁰

Di dalam kelompok agama itu sendiri berlangsung pula suatu proses diferensiasi yang hebat, sejalan dengan penyesuaian pada tatanan sosial dan pengakuan akan adanya ragam status. Perkembangan keagamaan dengan organisasi yang khusus merupakan proses dua muka, yang mencakup perubahan internal dalam arti gerakan keagamaan dan bersamaan dengan itu merupakan pula penyesuaian organisasi keagamaan dengan masyarakat umum. Bagaimanapun juga, proses penyesuaian telah membawa gereja ke dalam hubungan dengan dunia dan menempatkannya dalam hubungan itu. Gerakan keagamaan lain dengan isi pengalaman keagamaan yang berbeda dan yang berada dalam kondisi sosial-budaya yang berbeda pula dan mengikuti rutinitas yang beraneka. Penetapan stabilitas, usaha mencapai kesinambungan, evolusi dan formalisasi praktek serta ritus, penyesuaian

³⁰ Thomas F. O'dea. 1983. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Yayasan Solidaritas Gadjah Mada (YASOGAMA), Cetakan ke-2, hal. 67

dari berbagai kelompok keagamaan, protes yang seringkali melahirkan konflik dan perpecahan, semua hal itu merupakan masalah yang umum dijumpai dalam sejarah organisasi keagamaan yang khusus yang manapun juga.

Agama berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama senantiasa dipakai untuk menanamkan keyakinan baru ke dalam hati sumber terhadap alam gaib dan surga-surga telah didirikan di dalam alam tersebut. Namun demikian agama juga berfungsi melepaskan belenggu-belenggu adat atau kepercayaan manusia yang sudah usang. Agama merupakan produk kebudayaan atau pengembangan dari aktifitas manusia sebagai makhluk pencipta kebudayaan, dengan demikian, agama bisa dianggap sebagai suatu sarana kebudayaan bagi manusia dan dengan sarana itu dia mampu menyesuaikan dirinya dengan pengalaman-pengalamannya dalam keseluruhan lingkungan hidupnya; termasuk dirinya sendiri, anggota-anggota kelompoknya, alam dan lingkungan lain yang dia usahakan sebagai sesuatu yang transedental (tidak terjangkau penalaran manusia).³¹

Dalam menganalisa fungsi-fungsi sosial dari tingkah laku keagamaan, kita harus berhati-hati membedakan antara yang ingin dicapai oleh anggota-anggota suatu kelompok pemeluk tertentu dan akibat yang tidak dikehendaki dari tingkah laku mereka dalam kehidupan masyarakat. Dan hal ini terjadi pada studi kasus kaum Katolik di Cina, dimana orang-orang tersebut lebih sering tidak menyadari banyaknya

³¹ Elizabeth K. Huttineham, diterjemahkan oleh Abdul Muiz Niharang, 2002, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Raka Grafindo Persada, Cetakan Ke-delapan, h. 7

akibat sosial yang timbul karena tingkah laku keagamaan mereka. Fungsi-fungsi yang tidak disengaja yang dilaksanakan oleh suatu bentuk tingkah laku institusional tertentu kadang-kadang dinyatakan sebagai fungsi *latent* (tersembunyi); sedangkan fungsi-fungsi yang disengaja, tujuan-tujuan resmi dari lembaga tersebut disebut fungsi-fungsi *manifest* (nyata). Agama itu sendiri telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh.

Peranan sosial agama harus dilihat terutama sebagai sesuatu yang mempersatukan. Dengan kata lain agama menciptakan suatu iatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Karena nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan bersama dalam masyarakat. Agamapun cenderung melestarikan nilai-nilai sosial. Agama tidak selalu memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan. Agama bisa juga menjadi kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belahkan, dan bahkan menchancurkan, khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif dan bahkan bersifat revolusioner. Seperti yang

peranan yang bersifat kreatif, inovatif dan bahkan bersifat revolusioner. Seperti yang terjadi di Polandia, yang merupakan negara komunis akhirnya runtuh dari kekommunisannya karena gerakan kaum katolik di negeri itu, begitu juga dengan Yugoslavia yang kini pecah. Bisa saja Cina seperti itu. Semuanya sangat berbeda-beda sepanjang sejarah dan tergantung kepada keanekaragaman corak masyarakatnya.

Pandangan para filsuf Kristen, umat Kristen, termasuk sistem kelasnya dan tatanan-tatanan ekonomi dan politiknya, diwarnai oleh tujuan moral. St. Augustine, dalam bukunya *City of God* menjelaskan bahwa: "Pembenaran moral dari umat adalah untuk mempersatukan kondisi-kondisi semacam itu sehingga orang-orang Kristen dapat menjalankan kehidupan duniawi mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang abadi."³² Perwakilan utama dalam umat, sebagaimana dipahami oleh Augustine, yang memungkinkan individu-individu memperoleh keselamatan adalah Gereja Kristen yang terorganisasi sebagai sarana yang dinobatkan oleh Tuhan memberikan rahmat.

Apabila organisasi sosial yang dimaksud untuk membentuk tingkah laku manusia sesuai dengan pola yang ditentukan, baik pola yang ditetapkan oleh doktrin agama, ajaran etik maupun oleh filsafat politik ingin berhasil dalam masing-masing, maka organisasi-organisasi itu harus berhasil dalam dua sektor³³:

³² Elizabeth K. Huttingham, diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharang, 2002, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: RakaGrafindo Persada, Cetakan Ke-delapan, hal. 107

³³ Elizabeth K. Huttingham, diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharang, 2002, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: RakaGrafindo Persada, Cetakan Ke-delapan, hal. 121

1. Di satu pihak organisasi-organisasi tersebut harus bisa menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.
2. Pihak selanjutnya, apabila organisasi-organisasi itu ingin mempengaruhi masyarakat yang lebih luas, mereka jelas harus mengembangkan organisasi dan memperbesar pengaruhnya yang potensial dengan cara memasukkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di luar lingkungan mereka.

Pentingnya upacara keagamaan dalam pemerintahan menurut Kong Hu Cu:

Apabila orang dapat memimpin sebuah negara dengan upacara keagamaan dan rasa hormat, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan; tetapi bila orang tidak dapat memimpin sebuah negara dengan upacara keagamaan dan rasa hormat, lalu apa yang harus dilakukan orang dengan upacara keagamaan?³⁴

Upacara keagamaan tersebut hanya mempunyai nilai sepanjang upacara keagamaan tersebut membantu pemerintahan sebuah negara. Pentingnya upacara di dalam masyarakat Cina mungkin sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa bangsa Cina tidak mengikuti konsep tentang seorang pemberi undang-undang yang suci, sehingga tingkah laku manusia harus lebih banyak tergantung tata cara berperilaku berdasarkan sesuatu yang dapat dijadikan teladan (teladan tiruan, yang kepentingannya lebih ditekankan pada hubungannya dengan pendidikan). Kong Hu Cu kadang-kadang dianggap tidak mempunyai banyak pengaruh bagi kehidupan religius rakyat Cina, khususnya mengingat pengaruhnya bagi agama Budha dan kepercayaan lain.

³⁴ Raymond Dawson, Kong Hu Cu : Penata Budaya Kerajaan Langit. Terjemahan. Y. Joko Suyono, Jakarta, Grafiti, 1999 hal. 39

Orang Tionghoa tidak banyak mempunyai konsep tindakan sebagai ganjarannya sendiri yang dipunyai orang Eropa/Jepang, atau penghargaan mistik terhadap penderitaan dan kematian sebagai pengalaman yang mengubah orang. Tindakan harus mempunyai tujuan, demikian dirasakan oleh orang Tionghoa; tidak ada yang membuat orang mulia dalam penderitaan, dan kematian adalah gangguan akhirat yang hanya dapat bernilai sebagai tindakan simbolis yang memperkuat sebuah argumentasi. Wawasan pokok masyarakat Tiongkok adalah fungsionalitas³⁵.

Diletakkannya sistem keluarga dalam konteks masyarakat yang lebih luas (seperti dalam sosialisme) meningkatkan jumlah gaya hidup yang mungkin dan secara teoritis memberi semua orang eksistensi yang memuaskan. Dalam Etika Sosial ini – yang sedang dengan cepat dibuat ketinggalan zaman di kota-kota Tiongkok yang baru sadar akan keindahan dan mode – orang baru dikagumi karena bawaan kelahiran seperti kecantikan atau suatu bakat hebat, apabila dia menggunakannya untuk kepentingan kelompok atau bangsa. Tindakan adalah fungsional, dalam pandangan dunia Tiongkok, dan manusia – yang bertindak – benar-benar memainkan peranan. Sementara peranan sudah dimulai sejak usia yang sangat dini.

Pentingnya permainan peranan sosial ditekankan dengan sandiwara, tari-tarian, dan permainan yang tidak ada hentinya. Sementara peranan yang diberikan tadi menjadi lebih luas dan lebih rumit lagi dengan berlalunya tahun demi tahun. Bersama dengan pendidikan politik mulailah indoctrinasi tentang etika kelompok.

³⁵ David Bonavia, alih bahasa Leslie Gelson, 1980, *Cina dan Masyarakatnya*, Erlangga: Jakarta, hal. 36.

Semua bahan pelajaran mengandung ajaran: "Tirulah Lei Fung" (seorang prajurit teladan), atau "Cintailah Partai", atau "Mengabdilah Kepada Rakyat". Penyimpangan dari pola pertumbuhan yang telah ditentukan tidak dipandang sebagai tanda individualisme yang sehat. Bagi kebanyakan orang Cina agama mengandung kumpulan aneka warna kepercayaan dan praktek yang masing-masing dari ketiga aliran tersebut (Taoisme, Kong Hu Cu dan Budha) memberi sumbangannya³⁶. Kong Hu Cu mengajarkan filsafat pemerintahan menggunakan orang yang bertindak sebagai panutan dan tidak menggunakan hukum dan lembaga yang disusun dan diurus oleh manusia.

Pemikiran Kong Hu Cu mengenai orang yang memegang kekuasaan politik, pada dasarnya tidak sebagai orang yang mampu menguasai masalah administrative dengan mahir, melainkan sebagai orang yang dapat bertindak selaku panutan bagi rakyat, karena ketinggian moralnya. Pemerintah harus mendapat kepercayaan rakyat, suatu masyarakat tanpa kepercayaan kepada para penguasanya di perhatikan. Pada abad ke-20, kemenangan komunis dapat dianggap sebagai kemenangan atas kepercayaan bahwa kekuatiran kecil dan terselubung yang menderita, akibat kekurangan makanan dan persenjataan yang parah pada akhirnya dapat berjaya dengan menenangkan jiwa rakyat, suatu konfirmasi yang mencolok tentang fakta bahwa Kong Hu Cu telah membuktikan kebenaran atas prioritasnya. Penekanan pada penegakan reputasi tetap merupakan hasil dari pemikiran politik cina, sehingga

³⁶ Raymond Davis,
Langit, Pustaka

Niko Suyono, 1999, *Kong Hu Cu, Penatu Budaya Kerajaan*
hal. 5

perbaikan politik umumnya dianggap sebagai penegakan (reputasi) dan bukan pambaruan . Penyimpangan seperti ini diberlakukan sebagai gejala sikap anti sosial yang berbahaya dan ditangani dengan lemah lembut tapi tegas oleh para guru, yang tidak akan ragu-ragu mengunjungi orangtua untuk membicarakannya . Tubuh menjadi dewasa, kepribadian seorang Tionghoa diperlengkapi sempurna untuk peranan-peranan seumur hidup yang akan dimainkannya. Pentingnya menjadi anggota sebuah kelompok sosial, sebagai ganti keluarga besar dari zaman dulu, berarti kemitraan oleh semua anggota kelompok untuk membantunya aman dan makmur.

Partai komunis percaya bahwa dengan mengadopsi Marxisme-Leninisme, mereka menerapkan metode ilmiah terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Ketika Marxisme-Leninisme masuk masyarakat Tiongkok, pernyataan-pernyataan yang perlu dibuat berbeda dengan yang dibuat tentang Eropa. Maoisme – sistem gagasan penuh emosi yang diselubungi sebagai metode ilmiah-dapat dipandang sebagai hasil kesalahpahaman ini . Sesuatu yang sama baik dalam Maoisme maupun Marxisme-Leninisme klasik adalah diandalkannya Perlakuan buruk atau pembunuhan semua orang yang dicurigai sebagai lawan politik adalah rutin di negara-negara sosialis-komunis. Sebagaimana halnya di bawah kemaharajaan Tiongkok, dipandang pada hakekatnya fungsional. Kekuasaan adalah cara menerapkan keputusan yang dianggap tidak usah lagi dipertanyakan kebenarannya.

Dalam ajaran Kong Hu Cu, satu-satunya bentuk kekuasaan yang diresmikan adalah kesusilaan, apakah sebagai hukuman pengadilan atau sebagai penentangan terhadap invasi atau pemerintah yang zalim. Satu-satunya tanggapan emosi terhadap kekuasaan adalah perasaan tertuntut bela (kalau dianggap dapat dibenarkan) atau kemarahan dan kebencian (kalau tidak). Perwira militer dalam tataran ajaran Kong Hu Cu selalu secara moral lebih rendah dari sarjana-administrator; sama juga di Tiongkok modern dikatakan bahwa "kekuasaan tubuh dari laras senapan, tetapi partai memanggul senapan itu."³⁷

³⁷ Raymond Dawson, penerjemah: Y. Joko Suyono, 1999, *Kong Hu Cu, Penatu Budaya Kerajaan Langit*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hal 109

BAB III

GAMBARAN UMUM HUBUNGAN RRC-VATIKAN

A. Fluktuasi Hubungan Bilateral RRC – Vatikan 2000-2006

Sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lain yang mengalami pertikaian, pasti akan mengalami pasang surutnya hubungan antara pihak-pihak tersebut, entah hubungan yang baik maupun hubungan yang buruk, memuncak pada eskalasi yang menegangkan ataupun yang menuju kearah yang menjanjikan dalam upaya penyelesaian. Republic Rakyat China dan Vatikan pun mengalami permasalahan yang tidak berhenti mengalir dan naik turun layaknya gelombang air yang entah sampai kapan akan tenang kembali. Berikut ini adalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang memperlihatkan naik-turunnya hubungan bilateral kedua negara selama beberapa tahun terakhir :

- 28 Juli 2002

Pemerintah China kembali melakukan tindakan penindasan terhadap 3 pastor Katolik di Cina yang di jatuhi hukuman 3 tahun penjara di kamp kerja paksa hanya karena melakukan pelayanan ibadah tanpa meminta izin pihak komunis, yaitu:

1. Pastor Pang Yongxing, 30 tahun, di tangkap di rumahnya oleh polisi Cina pada bulan Desember 2001
2. Pastor Ma Shunbao, 50 tahun, di tangkap pada saat berlangsungnya ibadah Minggu Paskah, 31 Maret 2002

3. Pada Wang Liman, 52 tahun, ditangkap juga pada saat sedang merayakan ibadah Minggu Paitan.³⁸

4. Pada tahun meruntuhkan anggota Gereja Bawat Tanah di Baoding Hebei pada tanggal 7 Juli 2002 mereka di vonis kerja paksa karena alasan "merusakkan ketertiban masyarakat" berdasarkan hukum yang "berlaku". Kemudian mereka ditundukkan ke kamp kerja paksa di Balizhuang di Baoding Hebei.

Juga terdapat sekitar 18 orang Katolik yang ditahan polisi karena terlibat melakukan ziarah (perjalanan rohani) ke DongLu di Baoding pada bulan Mei 2002 & orang diantaranya dilepaskan setelah membayar denda sebesar \$3,850 karena "ziarah ilegal". Sedangkan lusinan lainnya, mungkin lebih dari itu, masih di tahan karena tidak memiliki uang untuk membayar tebusan.

• 30 November 2005

polisi Cina menahan enam pastor sebuah gereja Katolik yang tidak memiliki izin, dan menganiaya mereka. Para pastor tersebut adalah anggota keuskupan daerah Zhangding di provinsi Hebei, Cina Utara. Mereka ditahan pada tanggal 18 November lalu. Mereka adalah: Wang Jinshan dan Gao Lingshan (keduanya 50-an), empat pastor lainnya adalah: Gua Zhijun (36 tahun), Zhan Xinchu (60 tahun), Peng Jianjun (30 tahun), dan Zhang Yinhu (45 tahun).³⁹

³⁸ Republika Online - Selasa, 29 November 2005 asp/ant/pur, diambil tanggal 10 November 2006

³⁹ Ibid.

- 04 Mei 2006

Beijing (Gereja Katolik yang diakui pemerintah) kembali menahbiskan lagi seorang uskup tanpa persetujuan Vatikan – yang kedua dalam tiga hari –Setelah pada minggu (30/4) Ma Yinglin menjadi Uskup Kunming, Yunnan, Liu Xinghong kemudian diangkat pada rabu (3/5) lalu sebagai Uskup Wuhu, propinsi Anhui.⁴⁰

Hal tersebut merupakan langkah yang bisa menghalangi perundingan untuk menyambung kembali hubungan yang putus semenjak kaum komunis menguasai Cina tahun 1949.

- 6 Mei 2006

Juru bicara Departemen Agwama mengeluarkan pernyataan bahwa berdasarkan sepengetahuan Pemerintah Cina, dalam gereja Katolik Cina “pemilihan langsung dan pengukuhan sendiri seorang Uskup telah berjalan selama 50 tahun lebih”.

Hal ini merupakan alasan dasar dalam administrasi pribadi gereja Cina. Tapi, sesungguhnya mereka mengetahui bahwa dalam gereja Katolik terdapat struktur yang jelas; yaitu jika tidak ada Uskup, mana mungkin ada gereja Katolik. Akan tetapi, dalam gereja Katolik yang memilih Uskup adalah Paus. Bagaimanapun juga, pemerintah Cina memerlukan Uskup dengan persetujuan Paus. Dalam hal ini, dapatkah gereja tersebut dikatakan sebagai gereja Katolik? Para Uskup yang telah ditahbiskan (dalam kurun waktu 50 tahun terakhir) tanpa persetujuan Paus menyadari

⁴⁰ Kompas, Kamis, 4 Mei 2006, diambil tanggal 10 November 2006

situasi apa yang mereka alami dan hati mereka tidak tentram karenanya. Pada akhir 70-an – awal 80-an, saat kontak dengan pihak luar negeri menjadi lebih mudah.⁴¹ Para Uskup ini, melalui beberapa utusan, memohon “pengampunan dan pemulihan” kepada Bapa Suci. Jika memungkinkan, Paus menerima banyak permohonan tersebut, dan Paus meminta para Uskup tersebut untuk menyatakan pemulihan tersebut kepada para imam dan jemaat, tanpa harus memosisikan para Uskup tersebut sebagai lawan dari institusi pemerintah. Hal ini membuat Uskup, imam-imam dan orang percaya dapat menjalankan imanya dalam aktifitas rutin, dan tetap berada dalam pengawasan pemerintah.

Dalam 20 tahun terakhir, pada akhir 50 tahun hubungan Cina-Vatikan, dalam tubuh Gereja, semua pihak akhirnya menyetujui pentingnya penahbisan para Uskup oleh Paus. Juru bicara Departemen Agama mengatakan (meskipun lebih terkesan sebagai pembelaan diri) bahwa mereka menginginkan dialog yang tulus dan jujur dengan Vatikan, dan juga bahwa pemilihan uskup yang baru itu merupakan suatu kebutuhan yang “mendesak” bagi gereja Katolik di Cina dimana ada empat puluh keuskupan yang tidak memiliki Uskup. Bahkan pihak pemerintah Cina mengeluarkan pernyataan yang bersifat Teologis, yaitu: “dimana tidak ada Uskup, maka tidak ada pula gereja”.⁴² Karena alasan inilah pihak pemerintah Cina berani melakukan penahbisan sendiri, tanpa melalui persetujuan Paus, menawarkan bantuan untuk proses pelayanan injil.

⁴¹ asianews (rwp/rva/manila) diakses tanggal 10 November 2006

⁴² <http://www.asianews.it/view.php?l=cn&arf=6121> diakses tanggal 10 November 2006

- 5 Juli 2006

Para pemimpin Gereja Cina menyambut baik kunjungan dua utusan Vatikan ke Beijing untuk mendiskusikan hubungan Cina-Vatikan dengan perwakilan pemerintah Cina, akan tetapi rincian isi pertemuan tersebut belum diungkapkan.⁴³

- 20 Oktober 2005

Uskup Peter Zhang Bhai Ren, seorang pemimpin dari gereja bawah tanah Cina yang menghabiskan 24 tahun di dalam penjara karena imannya, meninggal tanggal 12 Oktober di usia 90 tahun. Uskup Zhang (Chang) dipenjara oleh pemerintahan Cina pada tahun 1955 dan tetap di penjara sampai tahun 1979 karena penolakannya meninggalkan kesetiannya kepada Tahta Suci.⁴⁴

- 28 September 2006

Paus Bedediktus ingin Kardinal Zen menjalankan perannya lebih besar lagi sebagai penasihat utusan Gereja Cina dan hubungan Cina-Vatikan.⁴⁵

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pembicaraan langsung di Roma tentang perubahan sejak 19 April 2005, saat terpilihnya seorang Paus baru. Sejak saat itu, seorang Kardinal baru asal Cina dipilih dan para pejabat senior baru diangkat untuk menduduki posisi penting di Vatikan.

⁴³ <http://ucanews.com/CH00661.1400> July 5, 2006 diakses tanggal 10 November 2006

⁴⁴ <http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=2200> , diakses tanggal 10 November 2006

⁴⁵ <http://www.ucanews.com/zy01174.1412september28,2006> , diakses tanggal 10 November 2006

B. Kondisi Sosial Keagamaan RRC

Sepertiga atau lebih dari 12 juta warga Katolik Cina bergabung pada sebuah gereja "bawah tanah yang tetatap setia pada Vatikan melalui puluhan tahun tekanan di bawah Partai Komunis setelah partai itu memperoleh kekuasaan tahun 1949. Republik Rakyat Cina yang didirikan tahun 1949 dan pada awal masa kekuasaan Partai Komunis tersebut banyak tindakan yang dilakukan oleh Partai Komunis terhadap agama-agama yang dianggap sebagai lambang Feodalisme dan Kolonialisme bangsa asing. Rumah-rumah ibadah, termasuk kuil-kuil, masjid-masjid, dan gereja-gereja diubah menjadi gedung yang bersifat anti-keagamaan untuk kepentingan sekuler.

Pada awal pemerintahan Republik Rakyat Cina (Partai Komunis), keyakinan terhadap agama dan praktek-praktek keagamaan disingkirkan karena pemerintah menganggapnya sebagai kemunduran dan takhayul semata dan juga karena beberapa pemimpin komunis dari Vladimir Lenin sampai Mao Zedong, sangat bersikap kritis, ragu terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Selama masa Revolusi Kebudayaan, agama dianggap sebagai hal yang feodalistik, ribuan bangunan peribadatan diluluhlantakkan oleh pemerintah Beijing. Akhirnya pada akhir 1970-an sikap pemerintah Beijing menjadi lebih lunak terhadap agama-agama seiring berakhinya larangan-larangan tertentu. Pada kenyataannya, Partai Komunis Cina akan bertindak keras terhadap kelompok-kelompok yang seolah-olah terlihat menentang pihak berwenang seperti Falun Gong. Sementara di sisi lain standar-buat tidak ambil

yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok yang mendukung pemerintahan. Saat ini, para "baik" pemerintahan tersebut kebanyakan adalah pejabat menengah keatas kuli-kuli agama Buddha yang disurveil secara era *China Komunis*. Pejabat tersebut mulai dilaksanakan dan penerapannya saat *1949*. Di Cina ada lima agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Buddha, Tao, Islam, Kristen, dan Kristen Protestan. Partai Komunis berpendapat bahwa keanggotaan agama sangatlah tinggi semua dan tidak pernah dapat keanggotaan Partai. Pihak tersebut menilai anggota Partai Komunis saja tidak sekuatnya dapat menerima tingkat saat yang tinggi. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan penerapan laporan statistik mengenai keanggotaan seluruh suku dipercaya akuratnya.

Kemungkinan orang di Cina tidak mau melaporkan aktifitas mereka dalam keanggotaan seluruh keanggotaan, meskipun begitu terdapat ratusan juta orang yang percaya akan kepercayaan tradisional dan keyakinan spiritual non-agama seperti pemujaan terhadap nenek moyang dan Feng Shui, dan juga keanggotaan informal di kuli-kuli lokal dan rumah-rumah ibadah-gereja yang tidak resmi. Berikut adalah laporan perkiraan statistik yang dapat dipercaya dibandingkan milik pemerintah Cina yang diterbitkan oleh Departemen Wilayah A.S dalam laporan tahunannya mengenai Kebebasan Beragama Internasional; dimulai dari yang terbesar.

Buddha, kurang lebih 8% dari populasi RRC dengan lebih dari 200.000 biarawan dan biarwati. Jumlah ini sebenarnya sangat kecil bila dilihat dari jumlah kuli Buddha yang sejumlah 16.000 buah.

- # Tao, tidak jelas dalam persentasenya, tapi ada lebih dari 25.000 biarawan dan biarawati agama Tao di lebih dari 1.500 kuil Tao. Keyakinan ini seringkali diartikan sebagai perpaduan antara agama Buddha dan agama tradisional leluhur.
- # Islam, sekitar 1,4%, tapi banyak pihak yang memperkirakan kalau jumlahnya lebih besar dari itu. Memiliki sekitar 45.000 imam atau lebih.
- # Kristen Protestan, 1,2% yang terdaftar di gereja-gereja yang diakui pemerintah Cina. Diperkirakan ada sekitar 2,5% warga Kristen Protestan lainnya yang beribadah di gereja-gereja tidak resmi.
- # Kristen Katolik, 0,4% yang terdaftar di gereja-gereja pemerintah, dan pihak Vatikan mengklaim bahwa terdapat 0,8% lagi orang Katolik yang menghadiri pelayanan/ibadah Katolik di gereja-gereja bawah tanah.

Republik Rakyat Cina secara konstitusional bukanlah negara atheis, tapi pemerintahannya mendukung propaganda atheis dan mendeklarasikan RRC sebagai "negara atheis".

Meskipun situasi HAM di Cina daratan telah meningkat-pesat sejak 1960-an (amandemen Konstitusi 2004 secara khusus menekankan bahwa negara melindungi hak-hak asasi manusia), namun pemerintahannya masih bersifat otoritarian dan mendominasi untuk mencegah adanya kelompok oposisi yang mengancam pemerintahan seperti orang-orang Tibet dan separatis Xinjiang. Amnesty Internasional memperkirakan bahwa RRC telah menahan ribuan tahanan politik. Dan selalu saja

ada laporan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang, meskipun mereka takut kalau hal tersebut melanggar hukum.

Konsep Cina mengenai hak-hak lebih terfokus pada tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dari warganegara untuk menciptakan negara yang kuat dan makmur dan bukan mengenai kewajiban pemerintah untuk menjamin kebebasan individual sebagaimana yang dilambangkan oleh para filosof eropa. Berdasarkan konsep tradisional itulah pihak berwenang Cina selalu menekankan mengenai "hak-hak positif" (seperti sandang, pangan, papan) dan bukan mengenai "hak-hak negatif" (seperti: pidato, pers, dewan perwakilan) yang harus dijamin oleh pemerintah.

- Konstitusi 1982 secara teknis menjamin kebebasan beragama, yang berbunyi:

Artikel 36

Warga negara RRC mendapatkan kebebasan keyakinan keagamaan. Tidak ada lembaga negara, organisasi bermasyarakat atau individu yang dapat mempengaruhi warga negara untuk meyakini atau tidak meyakini suatu agama; ataupun melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga negara yang berkeyakinan, atau tidak memiliki keyakinan terhadap suatu agama. Negara melindungi aktifitas normal keagamaan. Tidak ada seorangpun diperbolehkan untuk memakai agama sebagai alasan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu kesehatan masyarakat atau ikut campur dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga keagamaan dan Departemen Keagamaan bukanlah subjek bagi dominasi pihak asing.⁴⁶

Kebebasan tersebut lebih mengarah kepada pengaturan-pengaturan, sebagaimana semua kolompok keagamaan harus didaftarkan kepada pemerintah dan dilarang memiliki kesetiaan selain terhadap pemerintah Cina.

⁴⁶ <http://www.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4959370.stm> diakses tanggal 10 November 2006

Pemerintah berpendapat bahwa larangan tersebut berguna untuk mencegah pengaruh politik luar negeri yang dapat mengganggu kedaulatan Cina, meskipun sesungguhnya kelompok-kelompok yang terkena larangan ini menolak ketertarikan mereka untuk ikut campur dalam urusan politik Cina. Aturan ini sangat berpengaruh terhadap aktifitas keagamaan di luar negeri (seperti Agama Katolik) meskipun sebutan yang lazim bagi individu dan lembaga di dalam kelompok-kelompok tersebut sangat rancu, yaitu "Kelompok keagamaan yang tidak terdaftar" dimana kelompok-kelompok tersebut diperbolehkan untuk ditindak tegas dan mendapat campur tangan pemerintah dalam tingkatan yang bervariasi.

Presiden Hu Jintao telah berulang kali mengungkapkan ketertarikannya terhadap masalah kesehatan spiritual masyarakat Cina yang berjumlah 1,3 Milyar. Tapi, bukannya berupaya untuk menghindari nilai-nilai (yang merusak kesehatan spiritual masyarakat Cina) yang ditinggalkan oleh Komunis Ortodox selama 25 tahun terakhir, dia malah memilih untuk membawa Cina kembali pada nilai-nilai Marxisme atau kedalam bimbingan Konfusius yang bersejarah dari pada memilih kepada nilai-nilai agama. Sejak dahulu, Partai Komunis Hu Jintao tidak berseberangan dengan agama (bahkan bagi siapapun yang ingin menjadi anggota partai komunis, tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan keagamaan). dan ketidaksepadanan itu diterapkannya melalui aturan-aturan yang tegas pada aneka ragam keagamaan dan tindakan separatisme di daerah Islam seperti Xing Jiang atau daerah Buddha seperti Tibet.

Para penguasa Komunis Cina mengawasi dengan ketat semua kegiatan agama dan menekankan bahwa warga Kristen dapat secara resmi menjalankan ibadah mereka hanya di gereja-gereja yang diawasi oleh negara, dengan polisi sering menahan mereka yang melawan petugas. Mereka bisa menahan para pastor untuk alasan yang mereka inginkan, mereka tidak memberi tahu kepada anda mengenai alasan itu. Pemerintah melakukan itu mungkin karena kampanye yang dilakukan sekarang agar gereja-gereja dan para pastor yang tidak memiliki izin mendaftar pada pemerintah dan dengan demikian tunduk pada pemantauan dan pengurusan resmi pemerintah. Cina pernah mengatakan bahwa ia menginginkan hubungan yang lebih baik lagi dengan Vatikan, tapi pihak Cina memaksakan kepada pihak Vatikan untuk menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan terlebih dahulu.⁴⁷

C. Kondisi Sosial Keagamaan Vatikan

Tahta Suci, istilah ini lebih tepatnya bukanlah merujuk kepada Gereja Katolik atau Negara Kota Vatikan, meskipun Tahta Suci, Vatikan, Gereja Katolik Roma merupakan satu subjek yang sama. Sebagaimana yang diketahui oleh komunitas internasional sejak sekitar abad kelima, bahwa *Tahta Suci* adalah pusat pemerintahan dari Gereja-Paus dan Katolik Roma – sebagaimana yang dinyatakan dalam Kanon 361 dari Kode Hukum Kanon (Hukum Gereja). Komunitas internasional mengakuinya sebagai pusat dari persekutuan dunia (*universal*), sebagai sesuatu yang unik di dunia, yang melakukan tindakan/tingkah laku/aktivitas atas

⁴⁷ Republika Online-Selasa 29 November 2005 afp/ant/pur diambil tanggal 10 November 2006

nama dan untuk kepentingan Gereja Katolik dan memiliki pribadi, tindakan dan berbicara atas dasar yuridis. Meskipun demikian, Tahta Suci tidak memiliki *power* dalam pengertian sekuler sebagai keinginan/kemampuan untuk mengatur dan mendominasi. Dalam pengertian *power* tersebut Tahta Suci memang tidak memilikinya (pada kenyataannya, hukum internasionalpun tidak bisa mendefinisikan secara pasti pengertian *power*). Tapi, jika berbicara mengenai subjek dari hukum internasional yang menunjuk kepada hubungan politik antara negara, Tahta Suci memiliki *power* yang seperti itu. Hal itu dilakukannya untuk menjaga keutuhan persatuan Gereja Katolik dan organisasinya, serta kebebasan dan persamaan derajat Gereja Katolik. Dalam hal ini, Tahta Suci sungguh-sungguh merupakan subjek dari hukum internasional yang giat ikut serta dalam kegiatan resmi internasional sebagai suatu kesatuan organisasi yang independent dan berdaulat.

Jika *politik* diartikan sebagai strategi yang digunakan untuk mempengaruhi kepentingan pihak tertentu, maka Tahta Suci tidak memiliki pengaruh *politik* itu. Tetapi, jika *politik* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk berperan serta membangun dan menguatkan hubungan antara negara-negara dan para pemimpinnya untuk masa depan dari komunitas internasional sehingga kelak bisa disebut sebagai *keluarga bangsa-bangsa*, yaitu bersatunya Gereja-gereja Katolik Khususnya dan Gereja-gereja lainnya, maka Tahta Suci memilikinya. Meskipun demikian, Tahta Suci masih memiliki fungsi yang lain, yaitu Tahta Suci sebagai otoritas moral, dalam

artian bahwa Tahta Suci memiliki tugas untuk melayani komunitas internasional dengan dua sasaran:

1. Keagamaan, sejak awal Tahta Suci mempunyai tujuan untuk menangani masalah spiritual Gereja Katolik dan umat Kristen keseluruhan.
2. Kemanusiaan, dalam pengertian bahwa Tahta Suci memiliki perhatian untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan internasional yang lebih *bermoral* dengan menaruh perhatian yang mendalam mengenai penegakan hukum melalui cara-cara kekuatan/kekerasan.

Mendiang Paus Yohanes Paulus II secara jelas mendefinisikan peranan dari Tahta Suci dengan komunitas bangsa-bangsa:

Berikut ini adalah fakta-fakta yang menjadi alasan mengapa Tahta Suci mengambil posisi di tengah-tengah komunitas bangsa-bangsa; untuk menjadi suara dari hati nurani manusia yang telah lama dinanti untuk dikumandangkan, dan tidak mengurangi kontribusi dari tradisi agama-agama lainnya. Sebagai otoritas rohani yang menyebar luas di dunia yang mana tugas Apostolic-(tugas pelayanan)-nya akan diteruskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kemanusiaan, dengan tanpa tujuan lainnya, selain tanpa mengenal lelah untuk mengingatkan pentingnya memenuhi kepentingan bersama (kepentingan umum), yang merupakan kebutuhan masyarakat, menghormati individu manusia, dan memaklumkan nilai-nilai spiritual yang paling luhur.⁴⁸

Karenanya, Tahta Suci tidak memiliki ambisi untuk mendominasi. Semua tindakannya dilakukan bukan untuk menaklukkannya, tapi untuk meyakinkan. Tahta Suci percaya bahwa perdamaian yang sejati dan abadi tidak bisa dicapai dengan penekanan pada penggunaan kekuatan atau kekerasan. Perdamaian abadi yang sejati itulah yang menjadi tujuan dari semua aktifitas moral dan yudisial. Berikut adalah

⁴⁸ Surat 1995 Untuk Korps Diplomatik Tahta Suci, No. 10, UCANews

strategi, atau disebut pula pedagang Tahta Suci dalam percaturan dunia internasional. Ada tiga keyakinan dasar yang menjadi landasan aktifitas internasional Tahta Suci, yaitu:

1. Pribadi manusia dan hak atas pengakuan dirinya menjadi prioritas dalam ketertiban hukum. Maksudnya adalah, pribadi manusia itu sendiri dan hak-hak asasinya harus menjadi inspirasi dan alasan atas semua aktifitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam politik internasional. Penghormatan atas hak-hak mendasar harus diawali dari asal mula mereka, meliputi nama, hak untuk hidup, dan semua jenjang kehidupan biologinya (anak-anak – remaja – dewasa), hingga wafatnya, secara alami.⁴⁹

Jika alat-alat hukum internasional mengakui pentingnya hak-hak asasi seperti hak untuk hidup yang terdapat dalam Artikel 3 Deklarasi HAM Universal (1948) atau Artikel 6 dari Pengakuan Internasional dalam Hak Politik dan Hak Sipil, lalu mengapa beberapa hukum nasional, aturan internasional dan studi biomedical masih ada yang mengancam kehidupan manusia, antara lain: *hak aborsi*, eksperimen terhadap embrio, pengembangan cloning manusia, atau bahkan *euthanasia* (suntik mati). Dalam hubungannya dengan komunitas internasional yang bertanggungjawab atas itu semua, pihak Tahta Suci tidak pernah berhenti menyatakan bahwa kehidupan adalah karunia dari Tuhan,

⁴⁹ Keikutsertaan Delegasi Vatikan: Konferensi Internasional mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio De Janeiro, Brazil 1992; Konferensi HAM Vienna, 1993; Konferensi Populasi &... Pembangunan di Kairo, 1994; Konferensi Perempuan di Beijing, 1995; Konferensi Habitat (Tempat Hidup) di Istanbul, 1996; dan di Konferensi Pembangunan Jangka Panjang (berkelanjutan) di Johannesburg, 2002

karenanya hidup itu harus dikuduskan. Dalam hal ini, Tahta Suci berbicara atas nama umat Kristiani dengan niat yang baik. Mendesak agar hak untuk hidup dijadikan landasan bagi hak-hak lainnya, seperti hak untuk bebas memiliki keyakinan dan agama; hak pendidikan; bekerja; berkembang, dll. Hak-hak fundamental tidak berasal dari negara, atau dari otoritas manusia lainnya, melainkan dari individu itu sendiri.

Tahta Suci selalu konsisten dalam mempertahankan pendapatnya mengenai kebebasan untuk memiliki keyakinan dan agama, bukan hanya dalam hal kebebasan beribadah, tapi juga kemungkinan untuk orang-orang beragama agar dapat berpartisipasi penuh dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik negaranya, dan sebagai anggota komunitas keyakinan tertentu. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Paus Yohanes Paulus II di Polandia (dulu kala sewaktu komunis masih berkuasa), harus diingat bahwa saat kebebasan beragama ditindas atau ditekan, pada kenyataannya kemudian, semua kebebasan manusia yang mendasar pun menjadi terancam pula.

2. Upaya pencapaian dan penjagaan perdamaian harus dijauhkan dari penggunaan kekerasan. Merupakan tiang dasar lainnya dalam aktifitas internasional Tahta Suci, sebagaimana yang pernah diungkapkan Paus Yohanes Paulus II sebelum Perang Teluk 1991, bahwa perang adalah petualangan tanpa henti, dan beberapa tahun lalu, saat operasi militer di Irak dimulai, perang selalu menjadi kekalahan bagi nilai-nilai kemanusiaan. Para Paus selalu menolak perang sebagai cara

yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan merugikan yang ada diantara manusia.

Perang akan selalu menjadi arti yang buruk untuk mencapai perdamaian. Selama masa kritis di Irak, Paus Yohanes Paulus II dan para asistennya selalu menyatakan bahwa setiap negara tertentu memiliki hak untuk melindungi eksistensi dan kebebasannya, dengan pengertian yang proporsional, melawan aggressor licik. Pada kenyataannya, pengalaman telah menunjukkan bahwa perang hanya akan menimbulkan peperangan lagi. Tahta Suci percaya bahwa penderitaan dan kehancuran yang disebabkan senjata merupakan bahaya (yang sering digunakan) dan dalam jangka panjangnya akan menimbulkan kejahatan yang lebih luas dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Jangan pula dilupakan bahwa perlombaan persenjataan, sebenarnya sangat beresiko menimbulkan kehancuran. Kemakmuran yang didedikasikan untuk penelitian dan pengembangan manusia tersisihkan. Perlombaan persenjataan melipatgandakan penyebab konflik dan meningkatkan resiko berkelanjutannya.⁵⁰

3. Penghormatan terhadap hukum internasional adalah pengertian paling adil dalam upaya mencapai resolusi damai dan bermartabat dalam pertikaian merugikan antara bangsa-bangsa.

Perdamaian bukan hanya tidak adanya perang, tapi dilandaskan pada hukum yang menjamin keadilan. Tahta Suci percaya bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan

⁵⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, No. 2315

konvensi-konvensi yang telah dihadiri negara-negara tersebut. Tanpa hukum, ketertiban akan menjadi kacau, kebebasan dan perdamaianpun akan terancam. Selama krisis Irak tahun 2003, Tahta Suci tidak menyetujui prinsip *preventive war* sebuah konsep yang digunakan untuk tujuan perang itu sendiri dan meminta supaya semua pihak (*Agresor*) untuk menghormati piagam PBB, terutama Bab VIII yang meliputi garis-garis besar acuan yang harus dipatuhi manakala terjadi ancaman atau serangan terhadap perdamaian.

Tahta Suci selalu menekankan pentingnya perdamaian dan pengakuan HAM, dan Tahta Suci selalu berulang-ulang mengingatkan negaran-negara dan pemimpin-pemimpinnya dalam hal ini. Bahkan Tahta Suci melakukan kontak tiap hari melalui diplomasi bilateral dan multilateral dengan tokoh-tokoh protagonist dalam peristiwa internasional.

Gereja Katolik berbeda dengan Gereja Protestan dalam beberapa hal, orang yang menjadi Katolik berarti menjadi satu kesatuan, dalam komuni dengan Gerja Universal, dan juga dengan Gereja-gereja lainnya, dimana kepala Gereja Universal itu adalah Paus. Komuni dan ibadah persatuan dengan Gereja Universal dan dengan Paus merupakan identitas dari Gereja Katolik dan orang Katolik dimanapun juga. dan Gereja Katolik Roma merupakan satu-satunya agama yang diakui mempunyai akses dalam hal hubungan diplomatic secara penuh. Hal ini berdasarkan atas organisasinya yang terpusat, universal dan transnasional. Tahta Suci saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 174 negara (yang terbaru adalah Qatar), yang akan

menambah hubungan dengan Uni Eropa dan Negara Berdaulat Malta. Hubungan resmi juga terjalin dengan Federasi Rusia dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kini menjadi Palestina. Sebagai anggota tetap Pengawas dalam tubuh PBB, juga sebagai anggota IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan juga dalam Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa dan juga sebagai Utusan Istimewa dalam Dewan Eropa.

Tahta Suci secara jelas membela kepentingan akan pribadi manusia, tubuh dan jiwa, menyangkut permasalahan cloning manusia, membicarakan mengenai kebebasan beragama yang melampaui kebebasan beribadah, juga memacu akan kepentingan dialog antar-agama, mencari solusi masalah Timur Tengah yang belum terpecahkan. Tahta Suci tidak hanya membela kepentingan orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen saja, tetapi juga semua pria dan wanita yang ingin menjadikan bumi ini sebagai tempat yang baik dan pantas untuk ditinggali. Semua ini berdasarkan atas keyakinan dalam pribadi manusia, yang yakin bahwa terdapat keluarga bangsa-bangsa dan niat baik universal yang menuntut untuk menemukan solusi yang pantas bagi masalah kemanusiaan. Tahta Suci tidak mengambil posisi sebagai pemimpin politik, atau warga negara atau tanggung jawabnya, tapi lebih kepada upaya untuk menggugah nurani seseorang dan semuanya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Hubungan Sosial Keagamaan Vatikan - Cina

Kertas tidak dapat memadamkan api; dalam hal ini, sangatlah tidak mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Biro Departemen Agama dan Asosiasi Patriotik yaitu mempertahankan otoritas atas Katolik Cina (dan juga atas semua agama lainnya) sesuai dengan keinginan Beijing. Meskipun gereja di Cina menyadari betapa pentingnya penahbisan para Uskup oleh Paus, lembaga gereja Katolik di Cina masih saja berupaya untuk mendapatkan Uskup yang sesuai keinginannya. Para kandidat Uskup tersebut dipilih oleh Dewan Uskup Cina (yaitu Konferensi Uskup Cina yang tidak diakui Vatikan) yang dilegitimasi oleh Departemen Keagamaan. Kemudian dewan tersebut mengirimkan permohonan mereka untuk mendapat penahbisan Paus di Tahta Suci – dan para uskup itu tahu bahwa hal tersebut sangatlah penting. Hanya setelah mereka mendapatkan persetujuan Paus maka para uskup tersebut dapat ditahbiskan. Bagi mereka yang dipaksa untuk nfenjadi Uskup tanpa mendapat persetujuan dari Tahta Suci, tidaklah mudah untuk mengalami situasi tersebut; dimana para pendeta umumnya menolak bekerjasama dengan mereka; warga Katolik lainnya tidak akan mau berpartisipasi dalam misa yang dipimpinnya. Sesuai dengan Kanon 1382 dari Hukum Kanon (Aturan Hukum Gerejani Katolik) mengenai pemutusan hubungan dan dampaknya.

Dari sikap yang ditunjukkan oleh para rohaniawan dan kaum percaya lainnya itulah terlihat suatu dampak yang sangat jelas. Dan seperti yang dikatakan oleh Kardinal Joseph Zen Ze-kiun: " ... di Cina hanya ada satu Gereja Katolik dan setiap orang Katolik di Cina mau dipimpin oleh Paus ..."⁵¹

Dalam beberapa tahun belakangan ini, ada beberapa kandidat uskup yang mendapat persetujuan dari Tahta Suci, tapi mereka kemudian mendapatkan berbagai masalah. Pihak pemerintah tidak mengizinkan mereka untuk mempublikasikan persetujuan dari Tahta Suci, dan sebagai gantinya, dalam perayaan penahbisan para uskup yang disetujui tersebut mereka dipaksa untuk menggunakan formula "persetujuan dari Dewan Uskup Cina" yang seolah-olah menggantikan persetujuan Paus. Hanya di luar dari koordinasi dengan pemerintah Cina-lah mereka dapat memberitahukan kepada para pendeta bahwa para kandidat tersebut telah dikonfirmasi dan disetujui oleh Tahta Suci (semua rakyat Cina sudah akrab dengan rancangan pemerintah itu).

Dalam kasus penahbisan Uskup Shanghai dan Xian tahun lalu (2005) semua pihak tahu bahwa kedua tahbisan tersebut telah mendapatkan persetujuan Paus baru kemudian para Uskup dan imam-imam mengadakan sandiwara pemilihan untuk memenuhi keinginan dan aturan pemerintah. Akhirnya pihak pemerintah mau tidak mau harus menerima kedua kandidat tersebut. Pemerintah Cina kemudian lebih banyak diam mengenai penahbisan kedua Uskup tersebut, hanya Lin Baonian (Wakil Ketua Dewan Asosiasi Katolik Patriotik Cina, yaitu lembaga keagamaan Katolik

⁵¹ <http://www.catholicnews.com/usa/05/050101.htm> (diakses tanggal 10/Nov 2006)

yang dibentuk pemerintah) mengatakan bahwa belakangan ini pemerintah Cina telah menjadi "sangat toleransi". dalam wawancaranya dengan Reuter.

Pada kenyataannya, baik pihak Cina dan Vatikan memberikan sinyal bahwa keduanya ingin menjalin kerjasama dalam masyarakat yang harmonis, dalam hal ini kerjasamanya bersikap pasif (kolaborasi pasif). Alias, tidak ada kecocokan diantara pemerintah Cina dan Tahta Suci. Karena itulah diharapkan oleh banyak pihak, dalam pembicaraan antara Cina dan Vatikan, akan memungkinkan untuk menemukan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sebuah kesepakatan adalah harapan yang diinginkan oleh rakyat Cina dapat terwujud. Tapi, Persatuan Katolik Patriotik Cina dan Biro Departemen Agama telah memaksa dua imam untuk menerima penahbisan pemerintah, bukan dengan persetujuan Tahta Suci (3 Mei 2006). Hal ini tidak dapat di mengerti, dan juga telah memupuskan harapan semua pihak yang menginginkan perdamaian segera tercapai. Sebetulnya siapakah yang menginginkan hubungan ini mundur lagi? Kata cardinal Joseph Zen Ze-kium. Meskipun diplomat Vatikan dan utusan Partai Komunis Cina seringkali melakukan kontrak yang tak teratur, namun tetap saja kontrak tersebut masih diselimuti rasa curiga. Para pimpinan partai khususnya takut kalau-kalau gereja (Katolik) akan menjadi titik landasan untuk tujuan anti pemerintah (komunis) seperti yang terjadi di Eropa Timur.

Terlepas dari masalah Taiwan, yang menjadi permasalahan antara Beijing dan Vatikan adalah mengenai wewenang untuk mengangkat Uskup Cina

(berdasarkan hierarki gereja Katolik, seharusnya yang memiliki wewenang untuk mengangkat Uskup adalah menjadi kewenangan Paus, sebagai pimpinan hierarki gereja Katolik) dan kini permasalahan tersebut tidak menuju ke arah penyelesaian yang baik, menurut Ren Yanli, seorang ahli hubungan gereja-negara di Institut Ilmu Sosial milik pemerintah Cina.

Analisis mengatakan bahwa keputusan Beijing untuk menahbiskan dua uskup tanpa restu Paus itu memperlihatkan bahwa mempertahankan kekuasaan atas gereja Katolik di Cina dianggap lebih penting dibandingkan memulihkan hubungan dengan Vatikan. Richard Madsen, seorang ahli hubungan Cina-Vatikan di University of California, San Diego, mengatakan, "Kalau Beijing ingin membuat perundingan terus berjalan, Beijing tidak akan menunjuk Uskup yang jelas-jelas di tolak akan diterima oleh Vatikan. Tidak jelas bagi saya apakah Beijing ingin perundingan ini terus berjalan."⁵²

Pemerintah Komunis Cina yang secara resmi atheis, secara khusus sangat khawatir terhadap Gereja Katolik Roma, yang diperkirakan memiliki sekitar 5-10 juta umat (berdasarkan survey yang dilakukan pihak pemerintah China, meskipun pada kenyataannya jumlahnya mencapai dua kali lipat dari jumlah tersebut). Salah satu alasan kekuatirannya mengenai Gereja Katolik adalah mengenai pendahulu Benekditus yaitu Paus Yohanes Paulus II, yang turut berperan dalam meruntuhkan komunisme di Polandia, negeri asalnya dan akhirnya ke seluruh Eropa Timur.

⁵² <http://www.asianews.it/view.phpReuters/Afp/Api/DI?I=en&arf=6121>, diakses tanggal 10 Nov. 2006

Suster Beatrice Leung, professor di Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sastra Biarawati Venzao di Kaohsiung, Taiwan mengatakan mengenai suatu isu baru dalam hubungan Cina-Vatikan: Cina tidak ingin membiarkan Paus memilih uskupnya sendiri, dimana "pemerintah Cina ingin mengontrol segala sesuatunya". Pemerintah Cina memaksakan pengaturan bagi gereja melalui organisasi terdepan pemerintah, yaitu Persatuan Patriotik Katolik. Pastor Bendit Vernander, direktur Institut Ricci Taipei, tempat pemikiran terdepan permasalahan agama dan kebudayaan di Taiwan, curiga, jangan-jangan Persatuan Patriotik Katolik khawatir bila Cina-Vatikan mencapai kesepakatan, hal tersebut akan menyatukan kekuasaan birokrasi yang dipegangnya. Suster Beatrice Leung mengatakan bahwa permasalahannya jauh lebih dalam dibandingkan keinginan kekuasaan birokrasi Persatuan Patriotik dan kecemasannya terhadap masa depan organisasi ini.

Runtuhnya komunisme telah menyebar luas ke seluruh dunia, dan kebangkitan dari Kapitalisme di Cina telah memperlemah legalitas ideologi Partai Komunis dalam memonopoli kekuasaan politik. Ledakan ekonomi negara ini telah menciptakan banyak masalah dan kemarahan mengenai ketidakadilan dan korupsi yang merajalela; banyak yang mencari solusinya dalam agama.

"Saya tidak melihat persiapan Cina untuk menormalisasi hubungannya dengan Vatikan yang akan mengarah langsung pada kebebasan beragama yang lebih luas, apakah menurutmu pemerintah Cina sedang mempersiapkannya?"³³

³³ http://www.usatoday.com/new/religion/2006-05-04-vatican-china_x.html diakses tanggal 10 November 200

Anthony Liu Bainian, Wakil Ketua Persatuan Patriotik Katolik Cina berharap bahwa ke depannya nanti, sekretaris negara Vatikan yang baru dapat meningkatkan hubungan Cina-Vatikan. Liu juga mengatakan bahwa kebanyakan orang di Cina daratan tidak memiliki keyakinan agama, dan dia berharap utusan diplomatik Vatikan yang baik dari tingkat atas dapat berkompromi dengan situasi istimewa dari gereja Cina dan bagaimana beradaptasi dengan masyarakat sosialis Cina. Pandangan public di Cina masih belum dapat memahami mengapa pemimpin rohani gereja Katolik, yang juga sebagai kepala negara satu-satunya di Eropa yang masih mempertahankan "hubungan diplomatik" dengan Taiwan, tidak mau memberikan persetujuan diplomatic terhadap RRC, kata Liu.⁵⁴ Hal ini, lebih ditekankan lagi, menghambat upaya pelayanan Injil di daerah daratan Cina.

Pastor Joseph Bai Jianguo dari Shanghai (26 tahun) telah menunjukkan permulaan yang bagus dalam tugasnya sebagai utusan Vatikan dalam kunjungannya ke Beijing. Ia mengatakan bahwa kunjungan itu telah membuatnya berharap bahwa Cina dan Vatikan akan melanjutkan kontak dan negosiasinya. "Saya berharap untuk melihat persatuan antara Gereja Cina dan Gereja Universal pada tahun 2008 saat suruh dunia berkumpul untuk perayaan Olimpiade di Beijing", kata sang Pastor.⁵⁵ Tahta Suci selalu siap siaga dan bersemangat, dari esok, dari pagi hingga malam, untuk memuali dialog yang membangun dengan kolega kami di Cina dalam upaya mencapai normalisasi hubungan bilateral.

⁵⁴ <http://ucanews.com/CH000657.1400> July 4, 2006

⁵⁵ <http://asianews.com/Ch00661.1400> July 5, 2006

Alasan mengapa otoritas Cina seperti membiaskan hubungan dengan Tahta Suci yang terlihat semakin memberikan harapan telah dianalisa secara luas dan mendalam dan terlihat sangat rumit. Salah satu alasannya adalah Persatuan Patriotik Katolik Cina takut, andaikan Cina dan Vatikan telah menjalin hubungan diplomatik lagi, Persatuan Patriotik Katolik Cina akan kehilangan pamor, kekuasaan dan pengaruh, serta kekurangan sumber ekonominya (biasanya dari pemerintah). Dan juga karena Persatuan Patriotik Katolik Cina memaksakan mengadakan penahbisan dan pertemuan-pertemuan para Uskup di Cina supaya dapat memasukkan anggotanya sebanyak mungkin dalam Konferensi Uskup Gereja Katolik Cina agar Persatuan Patriotik Katolik Cina dapat dan masih memiliki pengaruh dalam tubuh Gereja apabila hubungan Vatikan dan Cina telah pulih.⁵⁶ Perjalanan hubungan Sino-Vatikan (Cina-Vatikan) sangat rumit untuk dilalui. Pada bulan Februari dan Maret 2006 yang lalu, media massa membawakan berita-berita yang penuh akan harapan, akan tetapi pada bulan Mei 2006 lalu, Cina membuat konflik baru lagi dengan dua penahbisan Uskup – tanpa persetujuan Paus (30 April di Kumning, sebelah utara Provinsi Yunnan, dan satu lagi 3 Mei di provinsi Anhui, sebelah timur Cina). Menanggapi tindakan Cina tersebut, Vatikan bereaksi dengan mengumumkan pengertian atas penahbisan kedua uskup tersebut atas tekanan yang diterimanya dari pemerintah Cina. Tetapi juga tetap ada kemungkinan penerapan Kanon 1382 (Hukum Gereja), yaitu mengenai eks-komunikasi bagi kedua uskup tersebut. Namun, Kanon tersebut

⁵⁶ <http://www.asianews.com/> *Vatican Vista*, zy00359.1393 May 19, diakses tanggal 10 November 2006

hanya berlaku jika Paus sudah mengajukan sanksi tersebut. Konflik baru ini tampaknya sangatlah besar bagi Gereja di Cina, sama seperti sebelum-belumnya.

Antara pemerintah China dan Persatuan Patriotik Katolik China lah yang harus diselidiki. Media massa di Hongkong, Taiwan, dan Amerika Serikat secara keras mengecam Persatuan Patriotik Katolik Cina, terutama wakil ketuanya Anthony Liu, dan hal itu benar adanya! Akan tetapi sangat jelas bahwa Anthony Liu dan Persatuan Patriotik Katolik Cina tidak memiliki alasan yang cukup (meskipun ada) untuk menciptakan konflik tersebut di wilayah mereka sendiri, Cina. Pihak yang berwenang yang lebih tinggi jelas-jelas berada di belakang semua ini (pemerintah Cina).

Selama 20 tahun terakhir, terlihat bahwa Persatuan Patriotik Katolik Cina akan mengkritik keras Vatikan setia pemerintah Cina menginginkan tindakan tersebut dan memintanya melalui Persatuan Patriotik Katolik Cina. Sesudah itu CCPA akan mendapat kecaman yang keras dari semua pihak yang menentanginya akan tetapi di lain pihak, pemerintah Cina (yang menginginkan dan mengatur hal itu) kemudian akan berbicara dan mengeluarkan statement dengan kalimat yang halus dan sangat indah di dengar (hal inipun berlaku untuk kasus Kuming).

Pihak pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) selalu termotivasi untuk memprovokasi konflik Vatikan China. Mereka lagi-lagi menginginkan supaya normalisasi hubungan Sino-Vatikan berada dalam posisi kritis. Mungkin pengamatan lebih detail terhadap peristiwa-peristiwa sebelumnya dapat memberikan keterangan terhadap tindakan RRC tersebut.

Dalam beberapa tahun belakangan ini juga Gereja Katolik di China sedang mengalami beberapa masalah dalam masalah pelayanan pastoral dikarenakan, banyak Uskup-uskup Cina yang meninggal dunia dalam usianya yang renta. Sehingga 42 keuskupan atau lebih tidak memiliki Uskup. Hal ini menyebabkan masalah dalam bidang pastoral (tugas-tugas gereja). Lebih dari 5 tahun ini, pemerintah Cina mengizinkan imam-imam Katolik, seringkali dengan biarawati dan masyarakat Katolik turut berpartisipasi untuk memilih kandidat Uskup yang baru dan mengajukan namanya ke Roma untuk mendapat persetujuan Paus. Hal ini telah berlangsung selama 5 tahun terakhir di banyak keuskupan, yaitu: Xiangxian dan Jingxian (provinsi Hebei), Nanning (Guangxi), Bamang (Mongolia Tengah), Xi'an (Shaanxi), Wanzhou (Sichuan), Shanghai, Suzhou dan pada 7 Mei 2006 lalu di Shenyang (Liaoning).

Di semua keuskupan ini, para uskup ditahbiskan dan disetujui oleh Roma dan Cina. Vatikan sangat senang dengan perkembangan positif ini meskipun sangat lambat. Meskipun masih banyak keluhan mengenai campur tangan pemerintah Cina yang terlalu banyak, Roma merasa bahwa para kandidat masih bisa disetujui. Dalam hal ini terlihat adanya keterbukaan dan niat baik yang tumbuh dari kedua belah pihak. Pemerintah Cina seakan-akan berkata "kami (pemerintah Cina) tahu bahwa kamu (Gereja Katolik) harus mengajukan proposalmu ke Roma. Lakukanlah tugasmu, dan kami akan melakukan apa yang menjadi tugas kami". Pada moment ini normalisasi

hubungan antara Vatikan dan Cina seakan-akan menuju kearah yang menggembirakan.

Pada kenyataannya, berita baik itu tidak pernah secara resmi diakui atau diumumkan kepada public, bahkan untuk penahbisan Uskup di Shanghai atau Xi'an, yang telah diakui oleh RRC untuk mendapatkan persetujuan Paus. Pihak pemerintah memalingkan perhatiannya (terkesan tidak peduli) saat nama-nama para kandidat di kirim ke Roma untuk mendapatkan persetujuan Paus. Perbedaan yang besar masih terlihat jelas dari sikap pemerintah setempat dalam hal kerjasama yang dibatasi hanya pada tingkatan tertentu. Akhirnya para imam dan pemerintah setempat (Jingxian di Hebei) mengadakan pertemuan hingga larut malam mendiskusikan secara sengit apakah perlu untuk mengumumkan kepada public mengenai persetujuan Paus saat penahbisan uskup nantinya. Akhirnya mereka setuju bahwa persetujuan dari kedua belah pihak yaitu Paus dan pemerintah, kedua-duanya akan diumumkan.

Tapi hal yang penting adalah dalam beberapa tahun terakhir ini, meskipun harus melalui pergumulan yang berat, evolusi yang kudus untuk menuju keadaan yang lebih baik telah terjadi sebagai hasil dari titik paling penting bagi Gereja Katolik Cina, yaitu penunjukkan Uskup-uskup oleh Paus. Lalu penahbisan Uskup di Kuming dan Anhui yang sebelumnya telah direncanakan, dan diperkirakan akan berjalan lancar dan damai kemudian tiba-tiba menjadi sebuah konflik lagi. Hal itu terjadi dikarenakan pada Maret 2006, Paus Benecditus XVI menyebutkan bahwa uskup Hongkong akan menjadi cardinal (secara struktural dalam gereja Katolik,

berada di atas Uskup, sebagai wakil dari sebuah negara untuk Vatikan). Semua komunitas katolik Cina di Hongkong dan Taiwan seperti juga di RRC, menyambut gembira penunjukkan tersebut. Akan tetapi pemerintah Cina sangat terkejut dengan hal tersebut, karena Uskup Zen (Hongkong) telah dikenal baik sebagai kritikus tajam pemerintah komunis, yang sangat tidak mengharapkan Uskup Zen akan terpilih sebagai Kardinal.

Hampir setiap hari setelah kabar itu, media massa memberitakan mengenai observasi yang tajam dan terbuka mengenai apa yang kira-kira akan disarankan oleh Kardinal baru kepada Paus mengenai masalah Cina. Semua itu ada dalam publisitas yang luas, konflik yang tajam dan terbuka antara Kardinal dan Anthony Liiu dari PPKC. Pemerintah Cina tetap diam, tak berkomentar, tapi semua orang yakin bahwa reaksi dari pemerintah Cina akan segera menyusul, dan itu pasti terjadi.

Sementara itu, para uskup di Cina masih menunggu persetujuan Paus atas beberapa kandidat yang telah dikirimkan proposalnya sekian lama. Diantara para kandidat itu adalah Pastor Ma Yonglin (Kumming) dan Pastor Liu Xinhang (Anhui). Meskipun kedua kandidat tersebut dipilih dengan mayoritas suara, namun Roma tetap butuh waktu sebelum memberikan persetujuannya. Karena proporsla sudah dimasukkan bulan-bulan yang lalu, pemerintah Cina di Beijing dan di daerah (Kunming dan Anhui) merasa sudah waktunya untuk melakukan penahbisan yang telah direncanakan sebelumnya itu, meski tanpa persetujuan Paus. Vatikan yang

mendengar kabar akan dilakkukannya penahbisan itu berharap kabar itu tidak akan menjadi kenyataan

Pihak pemerintah mulai menekan para Uskup untuk menyiapkan dan merayakan penahbisan itu nantinya. Ada Uskup yang menolak dan ada pula yang menyetujuinya. Pada waktu yang hampir bersamaan, para Uskup dan Imam Katolik (Cina di Kunming mendapat e-mail dan telepon dari Hongkong dan dari tempat lainnya bahwa Paus secara tidak langsung meminta agar penahbisan itu ditunda dan jika diteruskan maka akan mendapatkan sanksi gereja. Akan tetapi, banyak pihak yang kecewa dan terkejut, termasuk Roma, manakala penahbisan Kunming tetap dilakukan. Terlebih lagi, Uskup yang memimpin penahbisan itu adalah Uskup Dong Guangqing (wulan), 88 tahun usinya, yang memperoleh Uskup pertama di Cina yang ditahbiskan tanpa persetujuan Paus tahun 1958 dan di eks-komunikasi. Akhirnya, Uskup Dong Guangqing mendapat persetujuan Paus pada tahun 1984, dan sangat dihargai Roma semenjak itu.

Pada saat penahbisan pemerintah Cina mengeluarkan komentar yang agak kasar sebagaimana yang dilaporkan berita-berita di TV, yang berbunyi:

Uskup Ma adalah Uskup yang ditahbiskan untuk Kuming. Paus belum menunjuknya, tapi kami harap Paus akan melakukannya tak lama lagi. Kami butuh Uskup untuk tugas pelayanan gereja kami dan kami yakin Vatikan akan setuju mengenai hal itu. Terlebih lagi, Cina berharap untuk meningkatkan hubungan dengan Vatikan.⁵⁷

⁵⁷ <http://ucanews.com/CH00313> may 15, 2006 diakses tanggal 10 November 2006

Pernyataan pemerintah Cina itu seakan-akan ingin mengatakan bahwa tidak penting apakah paus menyetujuinya atau tidak, Cina sudah punya Uskup Ma yang tidak ditahbiskan, meskipun kami ingin berteman baik dengan Tahta Suci. Dengan penahbisan itu, pemerintah Cina ingin mempermalukan Tahta Suci dan suaka alam ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di Cina, tidak peduli apapun yang terjadi, pemerintah Cina menginginkan Gereja Katolik Cina yang independent.

Tiga hari kemudian (3 Mei), Pastor Lio Xinhong ditahbiskan menjadi Uskup di Anhui. Lengkaplah konfrontasi antara Beijing dan Vatikan. Cina hanya berkepentingan dalam masalah diplomatic dan Tahta Suci lebih peduli pada masalah keagamaan dan HAM, karenanya hubungan keduanya tidak mudah untuk dipertemukan pada titik yang memuaskan kedua belah pihak.

B. Upaya Peningkatan Kerjasama Hubungan Cina-Vatikan

Tahta Suci selalu memberikan perhatian dengan seksama terhadap keadaan yang dialami gereja-gereja di Cina, tekanan-tekanan dan paksaan-paksaan yang harus mereka jalani bukan hanya secara fisik tapi juga mental (terutama bagi uskup-uskup yang ditekan untuk menerima penahbisan dari pemerintah Cina walaupun tidak mendapatkan restu dari Paus) yang dialami oleh kaum beriman di Cina. Namun pihak Vatikan tidak mau menjadikan semua permasalahan tersebut sebagai beban berkepanjangan, malah pihak Vatikan berusaha untuk menjadikan semua hal yang telah dialami oleh Gereja di Cina sebagai kenangan pahit masa lalu dan selanjutnya

berpikir dan mengharapkan suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang harus dipertimbangkan saat ini adalah bagaimana Vatikan dapat melaksanakan tugasnya untuk mendengarkan "suara-suara" dari Gereja di Cina dan berupaya mencari solusi yang tepat bagi semua pihak. Khususnya bagi komunitas Katolik di Cina dan lebih lagi bagi para Uskup dan Imam yang mendapat tekanan dari pemerintah untuk ikut serta dalam acara penahbisan oleh pemerintah, dimana para Uskup dan Imam tersebut dalam hati nuraninya sangat ingin menolaki keinginan pemerintah Cina, dan pihak Vatikan dapat merasakan itu.

Tahta Suci sangat berharap agar ada penghormatan dari pemerintah Cina terhadap Gereja untuk memiliki kebebasan dalam beribadah dan memiliki otoritasnya sendiri tanpa mendapatkan campur tangan dari luar lembaga gereja (pemerintah Cina) dan juga supaya berbagai tindakan kekerasan dan penindasan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Tahta Suci dalam taraf tertentu, menyadari perlunya kebutuhan akan pembicaraan yang jujur dan membangun dengan otoritas Cina yang berkepentingan dalam hal tersebut supaya dapat menemukan solusi yang tepat yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Tak hanya membahas masalah-masalah yang tersebut di atas tetapi juga membuka lembaran baru untuk dibahas kedepannya. Bagaimanapun, banyak pihak yang menyangsikan kesungguhan Cina dalam berdialog dengan Vatikan, bahkan pihak Cina mungkin tak akan menghiraukan dialog nanti, dan akan menciptakan kesulitan dalam upaya pemulihan hubungan Vatikan - Cina jika Cina masih melakukan penahbisan ilegal (tanpa izin Paus). Dengan

bertindak seperti itu terus – menerus, Beijing dapat kehilangan kesempatan untuk menutup perwakilan negara yang terakhir dari benua Eropa terhadap Taiwan.⁵⁸

Baik Cina maupun Roma tidak akan mampu mencapai kepentingan mereka jika melalui konfrontasi terus-menerus. Setidaknya hal itu jelas terlihat setelah Kanominasi Martir-Martir (memsukkan daftar nama-nama orang Katolik yang meninggal, karena tidak mau meninggalkan imannya, meski mendapat tekanan dan siksaan dari pemerintah komunis Cina.” Pada bulan Oktober 2000 dan setelah peristiwa di Kunming ini. Pemerintah Cina tidak akan bisa untuk terus-menerus berpura-pura bahwa ada kebebasan beragama dan pada saat bersamaan merolak normalnya hubungan Gereja Katolik di Cina dengan paus dan Gereja Universal. orang Katolik Cina tidak pernah menerima akan adanya Gereja Katolik yang tidak berkaitan dengan Vatikan. Orang-orang tersebut merupakan contoh yang setia terhadap negaranya dan juga kesediaan hingga akhir pada Paus. Paus Yohanes Paulus II memberikan contoh nyata yang tidak berkeseudahan, tetap tegak untuk berdialog dengan orang Cina.

Paus Yohane Paulus II seringkali meminta gereja-gereja di Taiwan dan Hongkong untuk menjembatani hubungan Cina-Vatikan, karena mereka dinilai lebih memiliki kapabilitas untuk memahami gereja Cina. Orang-orang Katolik Cina yang berada di Amerika Serikat selalu berpendapat bahwa dialog hanyalah merunjukkan kelemahan. Akan tetapi Paus Yohanes Paulus II membuktikan bahwa kenyataan tidak sama dengan pendapat khalayak tersebut, dialog adalah jalan yang harus ditempuh

⁵⁸ http://www.asianews.com/Vatican_Vista_zy00359.1393 May 19, diakses tanggal 10 November 2006

untuk mencari solusi permasalahan Cina-Vatikan. Konfrontasi atau konflik bukanlah cara yang harus ditempuh seseorang untuk mejcmbatani/menyelesaikan suatu permasalahan. Insiden Kunming telah mengingatkan kembali RRC dan Gereja Katolik Universal (Vatikan) untuk mengulang kembali dialog. Saat ini adalah waktunya untuk mengingat kembali kata-katanya bahwa perdamaian bukanlah *utopia* atau gagasan yang tak terjangkau, maupun impian yang tak terwujud. Perang/konflik bukanlah bencana yang tidak terhindari. Perdamaian bisa tercapai, melalui dialog, perdamaian bisa terwujud, daripada melalui konflik dan konfrontasi terbuka.

Dalam tahun-tahun terakhir, Beijing dan Tahta Suci (yang dengan berhati-hati menjajaki kemungkinan pemulihan hubungan resmi) sampai pada persetujuan mengizinkan para calon Uskup untuk meminta persetujuan Vatikan sebelum menerima jabatan di gereja yang dikuasai pemerintah. Kini pengaturan itu tampaknya runtuh, dengan organisasi gereja negara memaksakan pilihan-pilihannya sendiri.

Belakangan Vatikan memberikan sinyal bahwa Vatikan akan berupaya untuk menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan membangun hubungan diplomatic dengan Beijing sebagai bagian dari keseluruhan jaminan terhadap peranan gereja-gereja (khususnya gereja Katolik) di Cina. Kesiapan Vatikan untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan merupakan suatu keuntungan yang besar bagi pemerintah Cina, dan hal tersebut merupakan alasan utama bagi Beijing yang sedang berupaya bersikap lebih lembut dan lebih terbuka terhadap gereja. Analisis lainnya juga mencatat bahwa pembicaraan rekonsiliasi tersebut juga

membawa dampak yang baik bagi hubungan luar negeri Cina guna membangun kembali hubungan perdagangan dan kerjasama di bidang lainnya dengan negara-negara di dunia, termasuk negara-negara yang umumnya beragama Katolik di Amerika Tengah yang mana saat ini negara-negara Amerika Tengah memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Jiang Yu, Jurubicara dari Hubungan Luar Negeri Kementerian Cina mengatakan bahwa pemerintah Cina selalu tulus dalam meningkatkan hubungan dengan Vatikan. Pihak pemerintah selalu mau memberi dialog yang membangun dengan Vatikan dengan dua syarat dasar, yaitu:

1. Tahta Suci harus memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan.
2. Tahta Suci tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri Cina.

Untuk pra-syarat yang pertama, sungguh merupakan permintaan yang "unik" dari Republik Rakyat China, dimana kepada negara-negara lain, Beijing tidak pernah meminta syarat yang seperti itu. Pra-syarat yang ke-dua, semakin menegaskan kekhawatiran partai Komunis yang berkuasa di China akan "power" yang dimiliki oleh Vatikan, terutama terhadap komunisme. Selain juga ingin menekan Vatikan dan menunjukkan bahwa China lebih berkuasa⁵⁹.

⁵⁹ <http://ucanews.com/CH00661.1400> July 5, 2006 diakses tanggal 10 November 2006

C. Prospek Hubungan Bilateral Cina-Vatikan

Pertentangan terbesar adalah keinginan Beijing untuk memperahankan otoritas atas kaum Katolik Cina dan pada dasarnya atas semua agama di negara itu, menurut ahli Cina, Dorian Malovic dalam bukunya *Paus Kuning*⁶⁰. Kwun Ping-Hung (bukan orang Katolik), seorang pengamat dari Hongkong mengenai gereja-gereja di Cina mengatakan bahwa ia yakin, dialog di Beijing akan membantu promosi saling pengertian diantara keduanya. Dia memperingatkan, bagaimanapun juga jangan sampai ada pihak yang mencoba mendominasi, dan lagipula masih terlalu dini untuk negosiasi diplomatic resmi. Menurut Kwun, kedua delegasi Vatikan yang telah datang ke Beijing baru-baru ini telah memiliki pengalaman bertahun-tahun mengenai isu hubungan Cina-Tahta Suci. Kedua delegasi tersebut tanggap mengenai masa lalu dan kemungkinan masa depan, dan mengetahui prinsip-prinsip yang kedua belah ingin capai dalam negosiasi. Dan tidaklah mudah untuk mencapai "win-win solution", kedua belah pihak masih harus melewati jalan yang terjal.⁶¹

Untuk mencapai titik temu dalam suatu persengketaan antara dua pihak diperlukan cara yang efektif yang dapat mengakomodir keperluan semua pihak, dan sudah tentu bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan dialog sebagai langkah yang damai dan meyakinkan untuk kemungkinan penyelesaian konflik, dibandingkan dengan cara konfrontasi dalam permasalahan Cina. Dalam permasalahan Cina - Vatikan, dialog lebih banyak menciptakan prospek penyelesaian konflik,

⁶⁰ Kompas, Kamis 4 Mei 2006

⁶¹ <http://ucanews.com/CH00661.1400> July 5, 2006 diakses tanggal 10 November 2006

sebagaimana yang dilakukan para pionir jalan dialog Cina - Vatikan, mereka adalah para Uskup bawah tanah; Zhao Zhendong (Xuan hua) dan Jia Zhiguo (Zhanping). Dulu, mereka selalu bertentangan secara langsung dengan pemerintah, kemudian mereka beralih dari cara berkonfrontasi menjadi dialog. Mereka menunjukkan keinginan mereka untuk diresmikan pemerintah dan menerima beberapa Imam dari kalangan pemerintahan dalam keuskupan mereka. Kini mereka kerap kali dari kalangan pemerintah dalam keuskupan mereka. Kini mereka kerap kali mendapatkan kritikan yang tajam dari beberapa pastornya karena mereka memiliki semangat Paus Paulus Yohanes II yang mau berdialog dengan pihak komunis untuk menemukan solusi bagi masalah Gereja Katolik di Cina.

Ada pihak-pihak yang mengerti bahwa melalui jalan dialog, pihak komunis (pemerintah Cina) ditantang untuk membuktikan apakah mereka masih sama seperti era tahun 1950-an atau sudah berbeda. Para Uskup tersebut mau bekerjasama dengan pemerintah Cina yang komunis, tapi mereka menolak untuk mendirikan Gereja Katolik China yang independent, yaitu Gereja Katolik yang tidak memiliki hubungan dengan Vatikan, karena itu sama saja dengan bukan menjadi anggota Gereja Universal (Vatikan). karena adanya penolakan itu maka mereka ditekan dan dijatuhi kurungan rumah oleh pemerintah Cina selama berbulan-bulan. Dengan tindakan mereka itu para Uskup (yang juga mewakili Vatikan) menunjukkan bahwa mereka selalu ingin dan siap untuk berdialog dan bekerjasama. Akan tetapi sebaliknya, pihak komunis membuktikan bahwa mereka tidak siap untuk memberikan

kebebasan yang sesungguhnya bagi Gereja Katolik khususnya. Para Uskup tersebut, tahu sama seperti halnya yang diketahui oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II, bahwa melalui dialog, atau pembicaraan, dapat menghasilkan buah (hal-hal yang positif) yang lebih banyak dibandingkan melalui konfrontasi. Dan dalam satu hari, konfrontasi dapat menghancurkan lebih banyak dibandingkan dengan apa yang bisa dibangun lewat dialog selama bertahun-tahun. Konfrontasi hanyalah akan lebih banyak merugikan, berbanding terbalik dengan dialog.

Pemerintah China tahu bahwa pada masa mendatang situasi akan berubah, tidak sama seperti saat ini. Menyangkut upaya normalisasi hubungan China-Vatikan, dialog sudah sering dilakukan, tapi sepertinya kesepakatan tidak akan segera tercapai, namun hari normalisasi hubungan diplomatic China-Vatikan pasti akan terwujud. Antara lain terlihat dari hubungan yang berubah di antara komunitas Gereja Katolik Terbuka dan Gereja Katolik Bawah Tanah di China, banyak contoh baik yang telah terjadi. Kedua komunitas itu pun sudah seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas kejadian-kejadian atau isu-isu yang berkembang menyangkut China-Vatikan. Pihak Vatikan telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya untuk menormalisasi hubungan diplomatic China-Vatikan, mengenai dua syarat yang diinginkan China untuk dipenuhi oleh Vatikan telah mulai diwujudkan oleh Vatikan, yaitu melepaskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan, tapi tidak menghilangkan komunikasi dengan Gereja Katolik di Taiwan. Namun pemerintah China kemudian menahbiskan lagi Uskup-uskup tanpa persetujuan Paus, sehingga memperburuk

kembali hubungan dialog ke dua negara tersebut. Tapi pemerintah China melalui Persatuan Patriotik Katolik China selalu mengatakan bahwa itu semua dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan Gereja akan Uskup, dimana hampir limapuluh keuskupan yang tidak memiliki uskup.

Jika nanti Vatikan telah memindahkan keuskupan Agungnya dari Taiwan ke Beijing, maka itu berarti upaya normalisasi hubungan China-Vatikan akan kembali seperti sebelum tahun 1952 (diusirnya keuskupan Agung Vatikan yang juga sebagai kedutaan Vatikan dari Beijing oleh komunis yang mengambil alih kekuasaan pada 1949). Akan tetapi bukan berarti Vatikan tidak mempunyai hubungan lagi dengan Taiwan, karena Vatikan bukan hanya mewakili sebuah negara tapi juga mewakili Gereja Katolik. Karenanya, di mana ada Gereja Katolik, maka Vatikan masih memiliki hubungan. Dan diharapkan ke depan juga, Gereja Katolik di Taiwan dan Hongkong pun ikut serta dalam upaya normalisasi hubungan China-vatikan.

Banyak pihak yang memperkirakan bahwa hubungan China-Vatikan membutuhkan waktu yang masih lama untuk memulihkan hubungan diplomatiknya lagi, akan tetapi, menjelang diadakannya Olimpiade sebagai pesta olahraga bangsa-bangsa yang akan diadakan di Beijing 2008 nanti, kiranya momen tersebut akan menjadi salah satu poin positif yang dapat menunjang normalisasi hubungan China-Vatikan. Saat ini semua pihak sudah mengetahui bahwa Tahta Suci sudah siap untuk memindahkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing, jadi tidak ada lagi yang perlu digunungkan China mengenai masalah Taiwan ini. Hubungan diplomatik

antara China-Vatikan sebenarnya hanyalah masalah politik, tapi Paus tidak memiliki pikiran untuk suatu kepentingan politik, ataupun ambisi politik tertentu. Satu-satunya harapan dari Paus adalah orang-orang Kristen di China pada khususnya, dan semua agama lainnya dapat menikmati kebebasan beragama yang sesungguhnya.

Dalam negosiasi-negosiasi ke depannya, Vatikan berharap kepada pemerintah China untuk menormalisasi situasi Gereja-gereja Katolik di China daratan, yang berarti upaya untuk pencapaian kesepakatan bersama, atau solusi umum dalam pemilihan Uskup-uskup ke depannya. Dan juga supaya pemerintah China mau mengakui keberadaan Gereja Bawah Tanah. Vatikan percaya bahwa, kesepakatan bersama dapat tercapai, jika China juga memiliki keinginan yang sama seperti Vatikan untuk memperbaiki hubungan China-Vatikan. Jika di masa depan nanti telah tercapai normalisasi hubungan diplomatik China-Vatikan, pihak Vatikan mempunyai niat untuk meminta China agar menjamin batasan kebebasan beragama yang masuk akal, karena pihak Vatikan sendiri sadar bahwa sangat tidak mungkin mengharapkan kebebasan beragama yang penuh dalam waktu yang singkat, tetapi tetap harus ada batasan-batasan tertentu yang dapat diterima oleh akal pikiran. Karena bagaimanapun juga kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia. Dan pemerintah China, lambat atau cepat pasti harus bisa memenuhi tuntutan akan hak-hak asasi manusia yang lebih baik lagi. Pemulihan hubungan diplomatik China-Vatikan tergantung dari banyak hal. Saat ini China memiliki peranan yang penting dalam pergaulan internasional, dan akan sangat menguntungkan bagi China untuk

merespon hubungan baik dengan Vatikan, yang mana Vatikan telah memiliki hubungan diplomatic dengan lebih dari 174 negara-negara di dunia. Jika China memulihkan hubungan diplomatic dengan Vatikan, China juga dapat memperoleh keuntungan yang lain dari dunia internasional. Namun, semuanya itu tergantung dari proiritas kepentingan pemerintah China sebagai subjek dalam China-Vatikan, China menghendaki agar Vatikan harus terlebih dahulu mematuskan hubungan diplomatic dengan Taiwan, sebuah prasyarat yang tak pernah diminta China kepada negar manapu juga, tapi Vatikan sudah mersponnya dan bersiap untuk menindakan kedutaannya dari Taiwan ke Beijing. Sekarang tinggal menunggu China. Jika diumpamakan, seperti permainan sepak bola, saat ini Republik rakyat Chira lah yang membawa bolanya, dan pihak Vatikan menunggu bolanya untuk dimainkan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut :

1. Substansi hubungan sosial keagamaan China-Vatikan pada dasarnya meliputi hubungan antara Gereja Katolik di China dan Gereja Katolik Universal (Vatikan). Politik Internasional kedua negara masih saja diliputi banyak masalah, meskipun sudah lewat dari setengah abad, hubungan diplomatic China-Vatikan masih saja belum normal. Setelah putusya hubungan diplomatic China-Vatikan tahun 1949, telah banyak peristiwa yang terjadi dalam hubungan bilateral keduanya. Setelah partai komunis mengambil kekuasaan di China pada tahun 1949, hak asasi manusia dan terutama kebebasan beragama di China menjadi terancam dengan peraturan-peraturan dan tekanan-tekanan yang diberikan partai komunis yang atheis terhadap warga negaranya. Dan terhadap Gereja Katolik (Vatikan) partai komunis memiliki "perhatian" yang khusus karena memiliki kekhawatiran akan turut campurnya Tahta Suci dalam urusan dalam negeri China (yang dikecam karena pelanggaran HAM-nya). Sehingga pemerintah China kemudian membentuk lembaga keagamaan pemerintah yang bertujuan untuk mengakomodir dan mengambil alih kebutuhan Gereja Katolik di China, dan

agan Gereja Katolik di China tidak lagi memiliki hubungan dengan Vatikan, dan juga bahwa Vatikan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Karena secepat pemutusan hubungan diplomatik China-Taiwan, Taha Suci memindahkan Keuskupan Agung-nya ke Taiwan. Dan juga karena Vatikan merupakan satu-satunya negara Eropa yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

2. Upaya-upaya Yang dilakukan China dan Vatikan Dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral Keduanya sudah mulai menunjukkan arah yang jelas. Pemerintah China dan Vatikan telah berulang kali mengadakan kontak untuk memperbaiki normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, namun seringkali pula upaya pembicaraan tersebut terganggu dengan tindakan-tindakan yang merusak kontak antara China-Vatikan yang telah diupayakan. Pihak Vatikan meminta China agar lebih menghargai kebebasan beragama dan HAM di China daratan. Pihak Vatikan pun bersedia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan memindahkan Keuskupan Agungnya ke Beijing kembali. Vatikan juga telah mengadakan kontak yang intensif dengan Gereja Terbuka untuk mengakomodir kebutuhan Gereja Katolik di China. Pemerintah Chinapun melalui Persatuan Patriotik Katolik China mulai menunjukkan niat baik menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Vatikan dengan mengikuti prosedur yang berlaku dalam struktur Gereja Katolik dalam hal pengangkatan Uskup, yaitu dengan mengajukan

calon-calon Uskup yang akan dipilih ke Roma (Vatikan), kemudian mengharapkan persetujuan Paus. Padahal masa-masa sebelumnya pemerintah China melalui Gereja Terbuka acapkali mengangkat sendiri Uskup-uskupnya tanpa persetujuan Paus.

3. Prospek hubungan bilateral China-Vatikan semakin menjanjikan, dengan semakin intensnya kontak antara Vatikan-China, kemungkinan akan normalisasi hubungan diplomatic China-Vatikan menuju kearah yang semakin positif, meskipun akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai pemulihan hubungan diplomatic. Gereja Tertuka (yang diakui pemerintah china) sudah mulai melakukan kontak dan kerjasama yang baik dengan Gereja Bawah Tanah (Gereja yang setia kepada Vatikan). Dengan dipilihnya Kardinal Zen sebagai perwakilan tertinggi Vatikan untuk China, diharapkan akan semakin meningkatkan normalisasi hubungan diplomatic China-Vatikan. Dan dengan akan diadakannya Olimpiade 2008 nanti di Beijing, diharapkan normalisasi hubungan diplomatic China-Vatikan akan mencapai titik yang lebih memuaskan lagi. Dan dengan adanya kerjasama yang lebih intens lagi antara Gereja Bawah Tanah dan Gereja Terbuka, maka hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hubungan keduanya.

B. Saran

Pihak Vatikan harus lebih banyak lagi melakukan pendekatan dan komunikasi yang lebih intensif lagi kepada China dalam upaya untuk mencapai normalisasi hubungan diplomatik yang masih bermasalah. Pihak Gereja China sebagai bagian dari Tahta Suci (Gereja Universal) pun harus aktif melakukan upaya yang positif, baik itu melalui komunikasi yang membangun, seperti dialog, dan juga kerjasama dengan Gereja Terbuka untuk mencapai titik temu dalam permasalahan ini. Semakin sering melakukan kontak dan hubungan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk perbaikan hubungan, karena dialog akan lebih banyak menghasilkan solusi yang memuaskan kedua pihak daripada dengan tekanan-tekanan yang akan memicu konflik yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrain, F. Charles, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terjemahan: Luqman Hakim, Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta
- Bonavia, David, 1980, *Cina dan Masyarakatnya*, terjemahan: Dede Oetomo, Erlangga: Jakarta
- Dawson, Raymond, 1999, *Kong Hu Cu: Penata Budaya Kerajaan Langit*.
Terjemahan: Y. Joko Suyono, Grafiti: Jakarta
- Frankel, J., 1991, *Hubungan Internasional*, terjemahan: Laila H. Hasyim, Bumi Aksara: Jakarta
- Harskamp, Van, Anton, 2005, *Konflik-konflik Dalam Ilmu Sosial*, terjemahan: Bern Hidayat, Kanisius: Yogyakarta
- Haryono, Endi, Saptopo B. Ilkodar, 2005, *Merulis skripsi: Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*, Pusaka Pelajar: Yogyakarta
- Huttingham, K. Elizabeth., 2002, *Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharang, RajaGrafindo Persada: Jakarta, Cetakan Ke-delapan
- Martin H. Manser, Fergus Mc Gauran, 1995, *Oxford Learners Pocket Dictionary, New Edition*, Oxford University Press: Hongkong
- Mochtar Mas' oed, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES: Jakarta
- Nasution, Dahlan, 1984, *Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional; Kekuatan Politik*, Remadja Karya: Bandung
- Perwita, Banyu, Anak Agung, Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Rover, de C., 2000, *To Serve and To Protect: acuan Universal Penegakkan HAM*, terjemahan: Supardan Mansyur, Raja Grafinda Persada: Jakarta
- Soeprapto, 1998 *Hubungan Internasional; Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, Grafindo

- S. P. Varma, 1991, *Teori Politik Modern*, RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Thomas F. O'dea, 1983, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Yayasan Solidaritas Gajah Mada (YASOGAMA): Yogyakarta, Cetakan ke-2
- Wirajuda, Hassan, N., 2004, *Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Jurnal Penerangan PBB, 1995, *Globalisasi Pendidikan Tentang PBB*
- Jurnal Penerangan PBB, 1993, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia*
- <http://www.wikipedia.com/chinaandvaticanrelation/html>, diakses 7 Oktober 2006
- <http://www.wikipedia.org/vaticanchina.htm>, diakses 7 oktober 2006
- <http://www.asianews.com/chinaandvaticanrelation/html>, diakses 7 Oktober2006
- <http://www.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4959370.stm> diakses 10 November 2006
- <http://www.mirifica.net/wmview.php> diakses 10 November 2006
- <http://www.korr.pas.co.id/hubunganbilateralchinaandvatican.html> diakses 10 November 2006
- <http://www.yahoo.com/china+vatikan.html> diakses 10 November 2006
- <http://www.google.com/china+vatikan/html> diakses 10 November 2006
- http://www.usatoday.com/new/religion/2006-05-04-vatican-china_x.html diakses 10 November 2006
- http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/22/AR2006042201443_pf.html diakses 10 November 2006
- <http://www.vatican.va/article/martyr.china.html> diakses 10 November 2006